



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN LAMANDAU**



**TAPM** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik

**Disusun Oleh :**

**ADOLFINA PATANDUK**

**NIM: 018786195**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

**ABSTRACT****Influence Communication Against Community Empowerment in Rural Development in the District Lamandau**

**ADOLFINA PATANDUK**  
**Universitas Terbuka.**  
**Email : [adolfinapatanduk@gmail.com](mailto:adolfinapatanduk@gmail.com)**

The failure of government programs are caused by problems, as strategy and erroneous approach at the management of the program mismanagement . The Weakness of rural community in making changes related to the lack of rural communities, is able to access information resources Development as consequence of the Dynamics and changes policies that they should do it. District Government of Lamandau is hopefully very harmonious in communication between village head with the role of society and creating participation in Development, especially in rural areas that still have not been conducted maximally by the village head .

This research was conducted with the intent to test and analyze the effect of communication in the front of Community Empowerment in the rural development in the District Lamandau. The method used is a Quantitative Explanatory with techniques are distributing questionnaires to the 94 respondents who were determined by a random sampling technique. That respondents are public figures, Community Empowerment Board and the Institute of Public empowerment .

The results of calculations are using statistical processing of the product moment correlation, acquired correlation coefficient variable Communication towards community empowerment variables with  $r = 0.644$ . This result means that there is a strong relationship between the dimensions in the category of communication with community empowerment. Because the value the correlation  $r > 0$ , it's means there is occurred a positive linear relationship, the greater the value of communication dimension so the greater of community empowerment . The based on testing by using Analysis Path to appoint the influence communication is able of Community Empowerment in the rural development ( Y ), as appointed from the calculation of the correlation coefficient turned out to be 0.466, the coefficient of determination of 0.415. This means that 41.5 % of community empowerment in a variable proportion of Development in the District Lamandau explained by communication variables, this relationship is significant at 95% confidence level.

**Keywords : Communication and Community Empowerment**

## ABSTRAK

### **Pengaruh Komunikasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau**

**ADOLFINA PATANDUK**

**Universitas Terbuka.**

**Email : [adolfinapatanduk@gmail.com](mailto:adolfinapatanduk@gmail.com)**

Kegagalan program pemerintah disebabkan oleh banyak hal, dari mulai strategi dan pendekatan yang keliru sampai pada pengelolaan program yang salah urus. Lemahnya keberdayaan masyarakat desa dalam melakukan perubahan terkait dengan kurangnya masyarakat desa memperoleh akses informasi terhadap sumber-sumber daya pembangunan sebagai konsekuensi adanya dinamika dan perubahan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mereka ketahui dan mereka jalankan. Pemerintah Kabupaten Lamandau sangat mengharapkan komunikasi yang harmonis antara Kepala Desa dengan masyarakatnya dalam mewujudkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di perdesaan yang selama ini masih dipandang belum maksimal dilakukan oleh pihak Kepala Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Lamandau. Metode yang digunakan adalah metode eksplanatory kuantitatif dengan teknik menyebarkan angket kuesioner ke 94 responden yang ditentukan lewat teknik random sampling, yang menjadi responden adalah Tokoh Masyarakat, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan pengolahan statistik korelasi *product moment*, didapat koefisien korelasi variabel Komunikasi terhadap variabel pemberdayaan masyarakat dengan hasil  $r = 0,644$  ini berarti terdapat hubungan dalam kategori kuat antara dimensi komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat. Karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai dimensi komunikasi maka semakin besar pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *path analysis* (analisis jalur) menunjukkan adanya pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Y), seperti ditunjukkan dari hasil perhitungan ternyata diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,466, koefisien determinasinya sebesar 0,415. Hal ini berarti bahwa 41,5 % proporsi variabel pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Lamandau diterangkan oleh variabel komunikasi, hubungan ini signifikan pada taraf kepercayaan 95%.

**Kata Kunci : Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul "**Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalm Pembagunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau** " adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2014

Yang menyatakan,



**ADOLFINA PATADUK**  
NIM. 018786195

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

**JUDUL TAPM : PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN  
LAMANDAU**

**NAMA : Adolfina Patanduk**

**NIM : 018786195**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90**

**Pembimbing I**

**Andy Fefta Wijaya, Ph.D**

**NIP. 131 966 869**

**Pembimbing II**

**Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si**

**NIP. 19740818 200912 1 001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bidang Ilmu/**

**Program Magister Administrasi Publik**



**Dr. Darmanto, M.Ed**

**NIP. 195910271986031003**

**Direktur Program Pascasarjana,**



**Suciati, M.Sc., Ph.D.**

**NIP. 19520213 198503 2 001**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : ADOLFINA PATANDUK  
 NIM : 018786195  
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90  
 Judul TAPM : **PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
 PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN  
 LAMANDAU**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

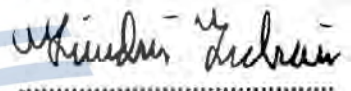
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Agustus 2014  
 Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d. 16.20 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**Panitia Penguji TAPM:**

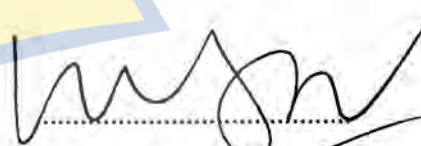
Ketua Komisi Penguji:

**Aminuddin Zubairi, M.Ed., Ph.D.**



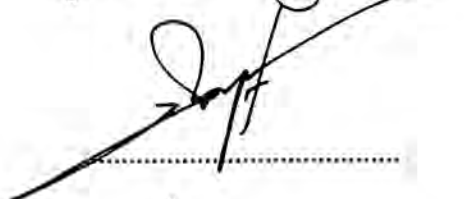
Penguji Ahli:

**Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.**



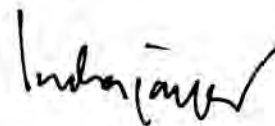
Pembimbing I:

**Andy Fefta Wijaya, Ph.D.**



Pembimbing II:

**Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si.**



Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan hanya kepada TYME, karena atas petunjuk dan kehendakNya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Tesis ini berjudul “Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau. Penulis menyadari bahwa apa yang terkandung di dalam Tesis ini pada dasarnya bukan hal baru, meskipun demikian penulis yakin bahwa yang diangkat merupakan fenomena di masyarakat yang perlu dicermati, dianalisis dan ditindaklanjuti. Dalam kerangka tersebut banyak hal yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terwujud sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Suciati, M.Sc.,Ph.D selaku direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Ibu Florentina Ratih W,S.IP.,M.Si, selaku ketua bidang ilmu / program magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
3. Bapak Prof.Dr.Holten Sion,M.Pd, selaku Kepala UPBJJ – UT Palangka Raya
4. Bapak Andy Fefta Wijaya, Ph.D dan Bapak Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan kesabarannya memberikan bimbingan serta masukan pemikiran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr.Irfan Ridwan Maksun, M.Si, selaku Dosen Penguji Ahli, yang telah memberikan masukan dan koreksinya demi penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pengajar pada Program Pascasarjana UPBJJ-UT Palangka Raya yang telah memberikan bekal ilmu serta membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Bupati Lamandau Bapak Ir. Marukan yang telah memberikan Ijin belajar pada Program Pascasarjana bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik.
8. Seluruh rekan-rekan senasib sepenanggungan pada program Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Palangka Raya, terutama rekan-rekanku Novprida Aulina Pasaribu, Letus Kilat Mantikei, Joni Iskandar dan Ahmad Rafi'i, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama yang baik.
9. Ayahanda (Alm) dan Ibunda (Almh) tercinta, doa dan pengabdian ananda selalu ananda persembahkan, beristirahatlah dengan tenang di sisi Bapa di Sorga
10. Orang yang selalu ada dan selalu mendukung serta menjadi penyemangat yang terhebat, suamiku tercinta Hendry Manurung, dan ketiga jagoanku Deon Tumpal Manurung, Michael Winatha Manurung dan Inaya Selly Romauli Manurung
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Menyadari sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, wajar kiranya jika penulisan Tesis ini terdapat kekurangan. Tesis ini masih belum sempurna, sehingga masukan berupa kritikan maupun saran sangat diharapkan, semoga hasil pemikiran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, meskipun dalam cara yang berbeda.

Palangka Raya, Agustus 2014

**ADOLFINA PATANDUK**  
NIM 018786195



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRAC .....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1. Maksud Penelitian.....	9
2. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Teori .....	11
1 Komunikasi .....	11
2 Pembangunan Masyarakat Perdesaan .....	29
3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan .....	32

4 Implementasi Kebijakan .....	37
5 Evaluasi Kebijakan .....	42
B. Kajian Empiris (Hasil Penelitian Terdahulu).....	43
C. Kerangka Pemikiran .....	47
D. Hipotesis Penelitian.....	58
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	59
B. Populasi dan Sampel.....	60
C. Instrumen Penelitian .....	64
1. Komunikasi .....	65
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	65
D. Uji Validitas dan Reabilitas.....	67
1. Uji Validitas.....	67
2. Uji Realibilitas .....	69
E. Teknik Pengumpulan Data .....	71
F. Metode Analisis Data .....	73
 <b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	78
1. Keadaan Geografis Kabupaten Lamandau .....	78
2. Visi dan Misi Daerah Kabupaten Lamandau .....	80
3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	82
4. Aspek Peningkatan Kesejahteraan, Pemerataan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat .....	84
B. Karakteristik Responden.....	86
C. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	89
1. Variabel Komunikasi .....	89
2. Variabel Pemberdayaan Masyarakat .....	91
D. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	93
1. Variabel Komunikasi .....	94
2. Variabel Pemberdayaan Masyarakat .....	111

E.	Pengujian Hipotesis Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau .....	128
F.	Analisis Teori .....	131

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	133
B.	Saran.....	134

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
3.1	Tabel Wilayah Penelitian dalam Jumlah Populasi .....	61
3.2	Tabel Alokasi Sampel per wilayah penelitian .....	63
3.3	Tabel Alokasi Desa Sampel per Wilayah Penelitian .....	63
3.4	Tabel Operasional Variabel bebas .....	66
3.5	Tabel Operasional Variabel terikat .....	67
3.6	Tabel pedoman untuk Memberi Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi .....	76
4.1	Tabel Keadaan responden Berdasarkan Pendidikan .....	87
4.2	Tabel Keadaan Responden Berdasarkan Usia .....	88
4.3	Tabel Responden Berdasarkan Mata Pencaharian .....	88
4.4	Tabel Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas dari Variabel Komunikasi .....	90
4.5	Tabel rekapitulasi hasil pengujian Reliabilitas dari Variabel Komunikasi .....	91
4.6	Tabel Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas dari Variabel Pemberdayaan .....	92
4.7	Tabel rekapitulasi hasil pengujian Reliabilitas dari Variabel Pemberdayaan .....	93
4.8	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Komunikator .....	95
4.9	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi komunikator .....	96
4.10	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Pesan .....	97
4.11	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Pesan .....	98
4.12	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Media .....	100
4.13	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Media .....	101

4.14	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Komunikasikan .....	103
4.15	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Komunikasikan .....	104
4.16	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Umpan Balik .....	107
4.17	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Umpan Balik .....	108
4.18	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai Variabel Komunikasi .....	109
4.19	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap Variabel Frekuensi komunikasi .....	110
4.20	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Sosial .....	112
4.21	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Sosial .....	113
4.22	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Politis .....	117
4.23	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Politis .....	118
4.24	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Ekonomi .....	120
4.25	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Ekonomi.....	121
4.26	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai dimensi Psikologis .....	123
4.27	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap dimensi Frekuensi Psikologis .....	124
4.28	Tabel Tabulasi Frekuensi Responden mengenai Variabel Pemberdayaan .....	126
4.29	Tabel Distribusi Jawaban responden terhadap Variabel Frekuensi Psikologis .....	127

## DAFTAR GRAFIK

Nomor	Tek	Halaman
4.1	Grafik Frekuensi Variabel Komunikasi .....	110
4.2	Grafik Frekuensi Variabel Pemberdayaan Masyarakat .....	127



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
2.1	Gambar Model Proses Komunikasi 2 Arah.....	16
2.2	Gambar Hubungan antar Variabel .....	57
3.1	Gambar Pengambilan Sampel .....	64





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian.

Manusia dalam kehidupannya tidak mungkin satu detikpun untuk tidak berkomunikasi. Pembangunan menjadi suatu yang bersifat universal karena pembangunan tersebut, dikomunikasikan, disebarkan disosialisasikan ke semua elemen bangsa. Begitu pentingnya makna pembangunan bagi suatu negara sehingga pemerintah memfokuskan segala kebijakan dan sumber daya agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di wilayah – wilayah perdesaan, prioritas pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah pun juga berfokus pada wilayah tersebut, mengingat hingga saat ini masih terjadi gap antara kota dengan desa dalam hal hasil-hasil pembangunan. Masyarakat di perdesaan juga ditengarai masih hanya sekedar sebagai obyek pembangunan, meski model-model pembangunan bersifat partisipatif seringkali digalakkan. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi salah satu indikator yang sangat penting bagi kesuksesan proses pembangunan. Seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan apabila pembangunan tersebut dikomunikasikan. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui apa dan bagaimana pembangunan itu akan dilaksanakan, sehingga terjadi kesamaan makna antara pemerintah dengan masyarakat, juga semua stekholder yang lain. Kesamaan makna ini akan melahirkan partisipasi sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan lebih bermakna

bagi masyarakat utamanya yang tinggal di perdesaan. Di sini komunikasi memainkan peranan yang sangat vital dalam proses pembangunan khususnya masyarakat perdesaan. Banyak persoalan pembangunan yang belum mampu dipecahkan di tingkat desa, misalnya masalah pengangguran, ketimpangan, kemiskinan yang kurang lebih 60 % diam di desa. Isu utama dalam pembangunan perdesaan, adalah menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat (desa) yang senantiasa beriringan dengan masalah perangkat lain seperti kemiskinan, oleh karena itu, perlu ada upaya pembangunan perdesaan yang dijiwai semangat otonomi yang ditujukan guna menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi, kemandirian dan kemampuan. Ini sangat relevan bagi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsepsi di atas secara eksplisit sejalan dengan arah kebijakan Nasional pembangunan perdesaan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 Rencana Pembangunan Desa didasarkan pada pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan dan cermat. Pada bagian lain ditegaskan bahwa Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan peningkatan akses masyarakat pada informasi serta sumber-sumber daya pembangunan.

Banyak kebijakan-kebijakan yang mendukung tentang pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pada kebijakan ini ditegaskan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Upaya pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari akses komunikasi yang terbuka dan transparan terhadap masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, ditegaskan pula bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya mengembangkan masyarakat informasi, salah satu tujuan dari ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan-badan publik yang lain.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau 2005 – 2025 adalah “ Kabupaten Lamandau yang maju, mandiri dan sejahtera

berbasis budaya”. Bupati Lamandau Ir. Marukan menekankan bahwa untuk mencapai visi dan misi tersebut diperlukan suatu proses perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya ke arah yang lebih baik lewat penerapan komunikasi yang lebih baik pula dalam memaksimalkan peran serta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan (Kalteng Pos, 6 Desember 2013 hal: 16), lebih lanjut diungkapkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai jika peran serta masyarakat dapat berjalan maksimal dalam proses pembangunan, seiring perjalanan waktu setiap masyarakat mengalami perubahan, baik fisik maupun sosial, karena adanya sifat dinamis dalam setiap kehidupan masyarakat maka pasti terdapat perbedaan, khususnya yang berkaitan dengan tradisi, norma budaya dan hukum adat yang masih fungsional diperlukan. Senada dengan yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Lamandau pada pelatihan kader pemberdayaan masyarakat bahwa masih terdapat desa yang sangat susah dalam memberi motivasi dan pembimbingan kepada masyarakatnya dalam berperan serta dalam pembangunan, belum mampu mengkomunikasikan setiap pesan-pesan pembangunan kepada masyarakatnya (Kaltengpos, 06 Desember 2013 hal 16). Dari pernyataan ini dipahami bahwa pola komunikasi yang dijalankan oleh kepala desa beserta aparat desa belum maksimal berhasil mempengaruhi masyarakatnya dalam berperan aktif dalam proses pembangunan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pembangunan perdesaan.

Kegagalan program pemerintah disebabkan oleh banyak hal, dari mulai strategi dan pendekatan yang keliru sampai pada pengelolaan program yang

salah urus. Lemahnya keberdayaan masyarakat desa dalam melakukan perubahan terkait dengan kurangnya masyarakat desa memperoleh akses informasi terhadap sumber-sumber daya pembangunan sebagai konsekuensi adanya dinamika dan perubahan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mereka ketahui dan mereka jalankan. Oleh sebab itu, tidak heran apabila timbul ketimpangan aktivitas dan dinamika lembaga desa. Adanya salah persepsi yang berakibat pada munculnya konflik-konflik sosial yang mengarah pada tindakan-tindakan kontra produktif dan tidak mampunya masyarakat dalam mengadopsi nilai-nilai baru dalam pembangunan.

Hal lain yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan lembaga, yakni bahwa Kepala Desa harus tanggap terhadap pesan-pesan pembangunan dan mampu menyampaikan pesan-pesan itu ke dalam bahasa atau lambang yang kiranya dapat dipahami oleh masyarakatnya. Belum efektifnya komunikasi yang dibangun berimplikasi pada tidak sedikit pesan-pesan pembangunan yang tidak sampai pada khalayak. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, dalam penelitian ini penulis memfokuskan lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Lamandau yang merupakan Kabupaten pemekaran sebagai salah satu dampak dari implementasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Terjadinya dikhotomi antara desentralisasi dan dekonsentrasi sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia seringkali justru menjauhkan implementasi otonomi daerah dari tujuan utamanya yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 melihat desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai suatu yang bersifat kontinum

bukan suatu yang bersifat dikotomis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Hal ini berkonsekuensi kepada paradigma otonomi daerah menurut Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 lebih mengedepankan aspek desentralisasi administrasi dibandingkan dengan desentralisasi politik. Untuk itulah menjadikan aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai koridor dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Letak geografis Kabupaten Lamandau yang menjadi daya tarik untuk memacu mobilitas sumber daya lokal, yang pada gilirannya membawa dampak terhadap aktivitas kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Kabupaten Lamandau, dari segi potensi daerahnya sangat strategis dalam pengembangan sumber daya alamnya. Di Kabupaten Lamandau terdapat 20 Perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebunan, hal ini membuka peluang besar dalam hal peningkatan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri lewat pola-pola kemitraan dengan pihak perusahaan. Namun karena kurang efektifnya komunikasi dari aparat pemerintah dalam hal ini Kepala Desa, kepada masyarakatnya lewat lembaga – lembaga pemberdayaan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap pola-pola kemitraan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pihak perusahaan kurang. Akibatnya bahwa kemitraan yang dilakukan seperti adanya program CSR (*Community Social Relationship*) dari pihak perusahaan Besar swasta yang seharusnya dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara umum, akhirnya dinikmati oleh kelompok tertentu. karena banyak masyarakat di perdesaan

memindahtangankan yang sebenarnya milik masyarakat ke kelompok tertentu karena kurang memahami akan tujuan jangka panjang dari adanya program pemberdayaan masyarakat lewat pola-pola kemitraan.

Mengacu kepada kebijakan nasional dan fenomena – fenomena di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau menggulirkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013. Bab IV memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah dijelaskan bahwa Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kabupaten Lamandau dan lebih berfokus pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana program terpilih yaitu membuka keterisolan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tingkat perdesaan, pihak aparatur dalam hal ini kepala desa sebagai pelaku birokrat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tanggap dalam setiap informasi, yang selanjutnya dikomunikasikan dengan masyarakat agar masyarakat bisa mengerti dan mengetahui setiap tujuan dan maksud dari setiap kebijakan yang diambil, demi mendorong timbulnya partisipasi dari masyarakat. Sebagai pemimpin yang berada di desa, seorang Kepala Desa wajib mengetahui, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, baik itu yang bersifat administrasi, kelembagaan maupun rutinitas. Kepala Desa harus bisa

merangkul semua golongan masyarakat, termasuk Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, karena sejak terpilih Kades sudah menjadi milik masyarakat (Palangka Post, 9 desember 2013 hal : 13). Sangat jelas bahwa pemerintah Kabupaten Lamandau sangat mengharapkan komunikasi yang harmonis antara Kepala Desa dengan masyarakatnya dalam mewujudkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di perdesaan yang selama ini masih dipandang belum maksimal dilakukan oleh pihak Kepala Desa sebagaimana beberapa kutipan pernyataan oleh Bupati Lamandau dan Wakil Bupati Lamandau .

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai **PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN LAMANDAU.**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Bila dicermati dari fenomena di atas, maka dapat dirumuskan pernyataan penelitian (*problem statement*) yaitu bahwa "Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan belum optimal dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum maksimal, sebagai akibat dari pola komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan di tingkat perdesaan yang belum harmonis dan belum tepat sasaran . Masyarakat belum memahami akan pesan-pesan pembangunan yang diprogramkan pemerintah, baik dalam bentuk pola-pola kemitraan dengan pihak swasta, yang berakibat pada



kurang maksimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat di desa sebagaimana tujuan dari program-program pemerintah. Tegasnya bahwa Pengembangan lembaga desa yang diidentifikasi melalui komunikasi belum optimal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan perdesaan. Pernyataan penelitian tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*Research question* : Seberapa besar pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau.

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian.**

#### **1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan perdesaan. Melakukan penelusuran berbagai teori yang berhubungan dengan pola - pola komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan, menguji dan menganalisis kemudian membuat rekomendasi pragmatis berupa bahan informasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah .

#### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Lamandau.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik, dari aspek teoritis, dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori Administrasi Publik khususnya teori-teori pemberdayaan.
2. Kegunaan Praktis .
  - a. Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi dan rumusan-rumusan pemikiran yang aktual, pragmatis bagi para pengambil keputusan (praktisi). Untuk para Kepala Desa, sebagai masukan dalam menerapkan pola komunikasi yang digunakan dalam hal mewujudkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan.
  - b. Bagi para peneliti, dapat dijadikan sumber informasi guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam kajian serupa dari variabel lain yang tidak diidentifikasi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Komunikasi

Keberagaman pengertian komunikasi, disebabkan karena banyaknya disiplin ilmu yang telah memberi masukan terhadap perkembangan ilmu komunikasi (Cangara, 1998 dalam Nugroho, 2004). Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata latin *Communis*, yang merupakan dasar kata bahasa Inggris "*Common*" yang berarti sama. Sama yang dimaksud di sini adalah sama makna, Effendy (1990:9) dalam Enthang, 2007. Pendapat lain yang lebih jelas tentang pengertian sama, yakni membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, Cangara (1998 :17) dalam Nugroho (2004). Dari kata tersebut berkembang menjadi *Communicatus* (bahasa latin), dalam bahasa Inggris "*Communication*" yang berarti perkabaran atau perhubungan. Dipandang dari istilah ini oleh Bernard Berekson dan Steiner dalam Nugroho (2004: 8), *Communication is the transmission of the information*, yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka, (Cangara, 2000: 19) dalam Nugroho (2004). Andersch E.G. (1969: 15) dalam Nugroho (2004),

*communication will be defined ...as a purposeful process, which involves sources, messages, channels, and receivers.*

Dari definisi ini terlihat bahwa komunikasi adalah merupakan suatu proses sadar, yang melibatkan sumber, pesan-pesan, saluran dan penerima. Dari kata proses sadar, dapat dipahami bahwa mengandung pengertian tujuan, karena setiap kegiatan jika dilakukan secara sadar tentu mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang akan dicapainya. Proses mengandung pengertian dinamis, senantiasa bergerak, berubah dan berkelanjutan, unsur-unsur di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain, saling pengaruh mempengaruhi. Untuk memahami pengertian komunikasi secara efektif, maka paradigma yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dalam Rochajat dan Elvinaro (2012: 39), bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab beberapa pertanyaan "*who says what in which channel to whom which what effect?*" Paradigma tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi melibatkan lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni; (1) komunikator (*who*); (2) pesan dan message (*says what*); (3) saluran atau channel (*in which channel*); (4) Komunikan (*to Whom*), dan (5) pengaruh atau effect (*Whit What effect*). Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa banyak pakar yang membuat pengertian komunikasi, namun demikian untuk memperoleh gambaran tentang komunikasi, maka pendapat Shannon dan Weaver yang dianggap dapat memberi pengertian secara representatif dari sekian banyak pengertian komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antara manusia yang saling pengaruh

mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi, dalam Rochajat dan Elvinaro (2012: 41). Untuk lebih menjelaskan pengertian komunikasi dapat dilihat dari ciri pokok terjadinya proses komunikasi yakni adanya maksud untuk memberikan sesuatu, dan oleh sebab itu proses ini menciptakan pesan untuk dapat mengirim pemberitahuan yang dimaksud yang dari pihak penerima dipandang sebagai (salah satu) sumber informasi (pesan) dan adanya sesuatu yang datang pada pengetahuan. (Achmad, 1990: 44) dalam Enthang (2007).

Setelah menyimak beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara esensial komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang (komunikator) yang dapat memberi pengaruh terhadap orang yang terlibat di dalamnya atau penerima pesan (Komunikan), baik menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Kesuksesan komunikasi terletak pada saling pengertian antara pihak pengirim (komunikator) dan penerima informasi (komunikan) dapat saling memahami. Untuk berlangsungnya proses komunikasi, maka pengirim pesan (komunikator) baru dapat mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang lain jika komunikasi berlangsung komunikatif antara komunikator sebagai sumber pesan dengan komunikan sebagai penerima pesan.

Guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Dalam administrasi pembangunan beberapa faktor

fundamental dalam rangka pemberdayaan yaitu ditentukan oleh “Kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan pendidikan.” (Tjokroamidjojo, 1991 : 226) dalam Enthang, 2007

Cooley dalam Nugroho (2004:13), bahwa :” *by communication is here meant the mechanism through which human relations exist and develop all symbol of teh mind, together with the means of conveying them through space and preserving them in time*”. Komunikasi merupakan faktor menentukan dalam keberhasilan dinamika organisasi. Komunikasi sebagai mekanisme eksistensial manusia untuk berhubungan dengan manusia lain dalam ruang dan waktu yang mereka miliki. Nugroho ( 2004:23), menyatakan bahwa: “komunikasi lebih banyak dilakukan daripada dipahami, oleh karena itu komunikasi menjadi sebuah aktivitas daripada sebuah kegiatan strategis yang bertujuan”. Barnard dalam Steers (1980 : 162 dalam Enthang, 2007) ), bahwa : “Dalam teori organisasi yang lengkap, komunikasi menduduki tempat yang sentral. Karena struktur, luas, dan ruang lingkup organisasi hampir sepenuhnya ditentukan oleh komunikasi. Sejalan pemikiran tersebut, Foy yang dikutip Sumaryadi (2005 : 118) menyebutkan bahwa “Pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*), komunikasi adalah landasan yang mendasari setiap perubahan organisasi ”.

Berkaitan dengan hal tersebut, Keith Davis (1979 : 372) dalam Enthang, 2007 mengemukakan : “*Communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to*

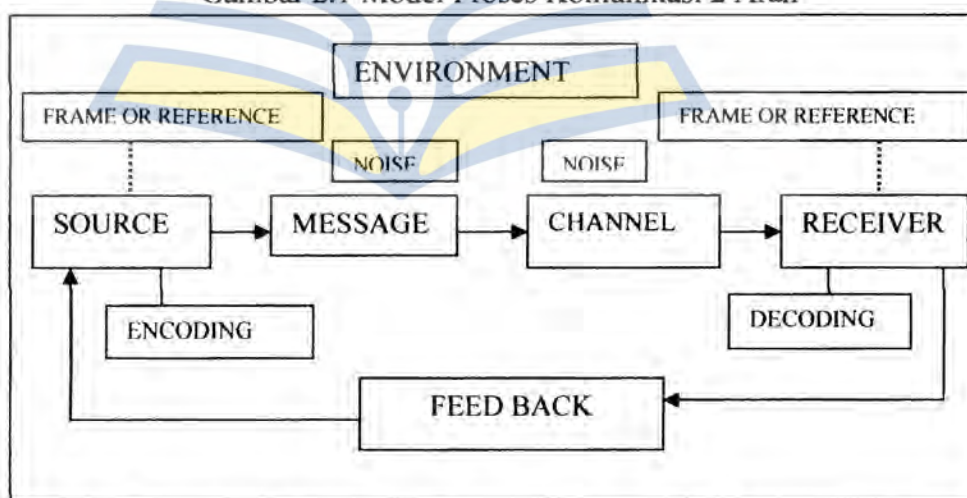
*another*". Sedangkan Rogers & Shoemaker (1981 :34) yang dikutip Ilyas (2004:19) mengemukakan komunikasi : "Sebagai proses pemindahan pesan dari suatu sumber dengan tujuan terjadinya perubahan perilaku si penerima". Ini berarti, bahwa komunikasi selain berfungsi menyampaikan informasi dan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain, sehingga terjadi tindakan kerjasama, juga komunikasi membantu mendorong membentuk sikap dan menanamkan kepercayaan dengan cara mengajak, meyakinkan dan mempengaruhi perilaku komunikan.

Bertolak dari pernyataan di atas, menggambarkan bahwa proses pembangunan dalam suatu masyarakat (desa) tidak mungkin dapat terlaksana dengan efektif, tanpa komunikasi terutama yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Sebagai faktor penentu dalam organisasi, pemimpin sebagai sumber penyampaian pesan atau komunikator harus senantiasa berkomunikasi dengan semua pihak, baik melalui hubungan yang formal maupun informal. Sukses tidaknya pelaksanaan tugas pemimpin tergantung kemampuan bagaimana dia berkomunikasi (*effective leadership means effective communication*) (Effendy, 1981 : 39) dalam Enthang (2007). Oleh karena itu, betapa besar peranan seorang pemimpin sebagai katalisator dan dinamisator pembangunan untuk ikut terlibat didalam pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Komunikasi sebagai proses komunikasi yaitu : "Proses penyampaian pikiran dan/atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media." (Effendy,

1981 : 15) dalam Enthang, 2007. Dengan demikian, proses komunikasi pimpinan adalah proses penyampaian pikiran/perasaan pimpinan kepada pegawai dengan menggunakan lambang (*symbol*) yang berarti yang diperlukan untuk membangun transaksi komunikasi yang diinginkan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa proses komunikasi melibatkan beberapa faktor yang saling terkait dan fungsional, yaitu : *Source*, *message*, *Channel*, *Receiver*, dan *Feedback*. (Hawkins, 1981 : 7; Nugroho, 2004). Kemudian Muhammad (1995 : 16) dalam Enthang (2007) memberi gambaran model proses komunikasi dua arah yang paling sering digunakan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Namun meskipun semua unsur yang terdapat didalamnya terpenuhi, dalam aktivitas komunikasi tidak dapat menjamin pesan akan mencapai sasarannya. Banyak faktor yang mendukung juga menghambat (gangguan) yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam berkomunikasi.

Gambar 2.1 Model Proses Komunikasi 2 Arah



Sumber : diadaptasi dari Enthang Andhi Muhtar (2007:214)



### a) Source

Disebut juga sebagai komunikator, yakni bisa seseorang, kelompok, lembaga yang ingin menyampaikan pesan kepada pihak lain. *Pertama*, tentu seorang komunikator menyandi (*encode*) pesan dalam pikiran /perasaan yang diformulasikan kedalam lambang (bahasa) yang dapat dimengerti oleh komunikan. Smeltzer dalam Nugroho, 2004 menyebutkan "*Encoding is the process of coding* . Sementara itu, Gibson (1995 : 107) dalam Nugroho, 2004 mengartikan *encoding* sebagai : "Proses penyandian yang menerjemahkan gagasan komunikator menjadi serangkaian tanda yang sistematis menjadi bahasa yang mengungkapkan tujuan komunikator." Setiap pimpinan melakukan komunikasi harus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi penerima. Sebab jika tidak, bukan tidak mustahil pesan tidak akan sampai pada sasarannya. Dalam proses *encoding* ini, pimpinan harus mampu memilih dan menggunakan simbol terbaik yang dapat menyampaikan gagasan mereka, dapat dimengerti oleh penerima, sehingga terjadi kesamaan makna antara pengirim dan penerima. Maknanya, tidak melekat pada simbol yang digunakan, tetapi pada sejauh mana penerima dan pengirim pesan memaknai sama terhadap simbol tersebut. Seseorang meng-encode ketika ia menggunakan simbol untuk menampilkan gagasannya. Simbol yang digunakan dapat berupa bahasa verbal atau non verbal, isyarat, gambar, warna dan lain-lain, yang secara langsung mampu menterjemahkan dan mengungkapkan gagasan seseorang tersebut sebagai suatu pesan. Sikap pemimpin yang

berusaha menyamakan diri dengan bawahan akan menimbulkan simpati. Bagi pemimpin yang mempunyai *emphaty*, maka tidak akan membiarkan orang lain berada dalam kegelisahan, kekecewaan dan frustrasi, dan ini berarti dia mau terjun langsung terhadap persoalan yang mengganggu. Oleh karena itu, Schramm (dalam Effendy, 1992:13) menyarankan ,bahwa komunikasi akan berhasil apabila “pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*), yakni paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experience and meaning*) yang pernah diperoleh komunikan”. Demikian pentingnya bagi pemimpin organisasi untuk dapat memahami *frame of reference* bawahannya tadi, mengetahui waktu, situasi dan kondisi yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesannya, dapat memilih saluran dan media yang cocok, serta menyediakan umpan balik untuk mengetahui efek dari komunikan. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin harus tanggap terhadap pesan-pesan pembangunan dan mampu menterjemahkan pesan-pesan itu ke dalam bahasa atau lambang yang kiranya dapat dipahami oleh masyarakatnya. Untuk menunjukkan kesamaan arti dari pesan-pesan yang disampaikan, Schramm (dalam Effendy, 1992:13), menyarankan agar pesan direncanakan isinya sedemikian rupa, sehingga mengandung perubahan-perubahan psikologis dan sosiologis.

**b). Message**

Adalah informasi/pesan yang akan dikirimkan kepada sipenerima, pesan bisa dalam bentuk verbal maupun non verbal. Pesan secara verbal bisa dalam bentuk terknis maupun lisan, sedangkan pesan yang non verbal berupa isyarat, gerakan tubuh, ekspresi muka dan nada suara. Pesan (*message*) yang disampaikan terdiri atas isi (*content*) dan lambang (*symbol*). Pesan pembangunan biasanya dalam bentuk : program, kebijakan- kebijakan, berbagai instruksi /perintah dari aktor pembangunan terutama para pejabat atau para pengambil keputusan. Tujuan komunikasi seperti telah disinggung sebelumnya selain untuk menyamakan persepsi, tapi juga bagaimana mengubah sikap, pendapat atau opini dan perilaku masyarakat (Prastiyanti, 2012).

**c). Channel**

*Channel* adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Selain itu, saluran merupakan mata rantai yang menghubungkan komunikator dengan komunikan. Dalam lingkungan suatu organisasi, saluran-saluran yang paling umum digunakan adalah audio visual. Saluran yang digunakan oleh pimpinan sebagai komunikator sangat tergantung kepada pesan dan pendekatan yang digunakan untuk mengirim pesan. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Smeltzer et al. (1991 : 8) dalam Enthang, 2007 bahwa : "*A leader suol select the best channel to eliminate communicational distorsio*". Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, kecocokan penggunaan media amat menentukan terhadap

keberhasilan komunikasi yang dijalankan. Media komunikasi interpersonal kelihatannya masih merupakan komunikasi yang cukup penting di pedesaan. Sebagaimana disebutkan Sukanto (1981 : 65) dalam Prastiyanti, 2012 bahwa : “Sistem komunikasi interpersonal masih amat dibutuhkan, dimana tingkat pendidikan dan minat masyarakatnya masih rendah terhadap media massa modern”. Karena sifatnya yang interpersonal, maka komunikasi di pedesaan sangat banyak tergantung kepada para pemimpin masyarakat dan para pemuka (*opinion leader*).

#### d) Decoding dan Penerima

Agar proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik, pesan yang disampaikan harus di-*encode* (ditafsirkan) sesuai dengan penerima. Jadi *decoding* adalah : “Proses penafsiran lambang yang mengandung pikiran dan perasaan komunikator dalam konteks pengertian penerima”. (Effendy, 1989 : 18). Di samping itu : “Proses komunikasi akan berlangsung dengan baik bila terjadi adanya kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan.” (Effendy, 1989 : 17). Untuk itu, perlu dipertimbangkan bagaimana perhatian selektif yang dilakukan penerima pesan. Komunikan dapat memilih apa yang tidak mau ia dengar/lihat. Selain itu, faktor kerangka acuan (*frame of reference*) dan faktor pengalaman penerima ketika menafsirkan pesan juga turut menentukan adanya persamaan makna pesan yang dikirimkan oleh komunikator.

### e) Feedback

Pengertian umpan balik sebagaimana dikemukakan Effendy (1989 : 45) yaitu : "Proses sampainya tanggapan komunikan kepada komunikator, setelah komunikan menilai suatu pesan yang ditujukan kepadanya." Sedangkan, Smeltzer et al. (1991 : 11) dalam Enthang, 2007 menyatakan bahwa feedback merupakan : "*The most assential factor to ensure that the message as received completely*". Untuk mengetahui bagaimana sikap atau respon masyarakat melalui lembaga desa yang ada terhadap program-program dan segala usulan, saran atau gagasan yang disampaikan, dalam komunikasi ini dilihat melalui *feed back* (umpan balik). Tersedianya umpan balik dalam komunikasi penting artinya untuk menguji seberapa jauh pesan-pesan pembangunan yang disampaikan itu bisa dimengerti, bagaimana hubungan yang terjadi melalui saluran komunikasi yang tersedia dapat menimbulkan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Media adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk membawa pesan ke audiens. Sama dengan beragamnya saluran, mediapun perkembangannya semakin bermacam-macam dengan jenis yang hampir tak terbatas. Diperlukan cara yang tepat dalam memilih media supaya bijak, efektif dan efisien untuk menghasilkan tindakan komunikasi menjadi lebih lancar. Media secara umum biasanya dibagi dua yakni verbal (media melalui percakapan) dan non verbal (media selain percakapan) (Yoga Admaja, 2010:49). Dengan adanya perkembangan teknologi, maka media dibagi dalam empat bagian yakni: 1) Verbal dan ekspresif: media yang menggunakan

bahasa lisan, bahasa tubuh kadang dibantu menggunakan alat yang sederhana yang ada disekitar untuk mengkomunikasikan pesan. Termasuk dalam media ini adalah percakapan, ekspresi tubuh, simulasi, yanyian, permainan, tari isyarat dan lainnya; 2) Cetak, media yang menggunakan tulisan, gambar yang dicetak di atas medium kertas, kain, plastik, kaos dan lainnya. Termasuk dalam media ini adalah poster, leaflet, buku, brosur, laporan, spanduk dan lain-lain. 3) Elektronik (multimedia): media yang menggunakan sarana elektronik/ listrik, termasuk di dalam media ini adalah rekaman lagu/suara, film, foto, kaset, cd interaktif, presentase power point dan lain-lain. 4) zyber: media yang menggunakan bahasa digital, termasuk di dalam media ini adalah situs web, email, blog, social network dan lain-lain (Yoga Atmaja, 2010: 49)

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan komunikasi pemerintahan Ndraha (2003: 469) menjelaskan komunikasi pemerintahan sebagai: Proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan *frame of reference* pihak yang lain, pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap pihak lain terbentuk, berubah, atau terpilihara, berdasarkan kesaling pengertian dan kesaling percayaan antara kedua belah pihak.

Agar komunikasi efektif Siagian (1999: 78) mengatakan setidaknya ada lima faktor yang harus diperhatikan komunikator yaitu, (1) kualitas komunikasi (2) informasi yang disampaikan, (3) media dan saluran komunikasi, (4) komunikasi dan (5) suasana komunikasi antar komunikator

dan komunikasi. Selanjutnya, Ndraha (2003: 231) menjelaskan bahwa proses komunikasi pada dasarnya adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain. Unsur-unsur yang terlibat sekaligus sebagai dimensi-dimensi proses komunikasi pemerintahan meliputi:

1. Komunikator (*Communicator*), yakni orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan.
2. Pesan (*message*), yaitu idea, informasi, opini dan sebagainya.
3. Saluran (*channel, media*) ialah alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan.
4. Komunikan (*audience*), yaitu orang yang menerima pesan.
5. Efek, yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan.

Unsur-unsur komunikasi tersebut di atas selalu dijumpai dalam kegiatan komunikasi. Karena itu unsur tersebut tidak bisa diabaikan dalam membahas komunikasi, atau dengan kata lain menjadikan komunikasi itu efektif. Adapun keberhasilan proses komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pesan, yang menurut Schramm (dalam Effendy, 1992:13) mengatakan bahwa: "Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*) yakni panduan pengalaman dan pengertian (*collection of experience and meaning*) yang pernah diperoleh komunikan. Dengan kata lain dalam proses komunikasi, komunikasi akan berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan.

Berdasarkan dimensi-dimensi komunikasi di atas, maka teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini ialah komunikasi pemerintahan yang diciptakan Ndraha (2003: 231). Alasan menggunakan teori tersebut, karena penemu teori adalah orang yang ahli di bidang pemerintahan dan penelitian ini juga dilakukan di pemerintahan. Kedua sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Lebih jelasnya dimensi-dimensi komunikasi pemerintahan yang pertama harus ada ialah komunikator pemerintah yaitu menyampaikan informasi. Kemudian disusul dengan pesan, agar informasi (pesan) itu dapat disampaikan dengan tepat komunikator harus memiliki kecermatan dalam memilih kata-kata yang tepat dalam merumuskan pesan itu penting dan menentukan agar ide-ide, gagasan-gagasan yang ada itu dapat dituangkan ke dalam lambang-lambang yang bisa dimengerti oleh penerima, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Informasi yang disampaikan kepada komunikan harus secara jelas dan dapat mudah dimengerti, sebab daya tangkap setiap komunikan adalah berbeda-beda. Oleh sebab itu lambang yang dipergunakan haruslah dapat dimengerti oleh mereka yang menjadi sasaran komunikasi, ini berarti kalau menggunakan bahasa maka harus digunakan bahasa yang dapat dimengerti. Di samping itu pesan yang disampaikan oleh komunikator hendaknya dapat menimbulkan minat dan perhatian dari komunikannya.

Selanjutnya tahapan lain yang juga perlu diperhatikan oleh komunikator adalah memilih saluran (alat) komunikasi yang akan dipergunakan untuk menyebarkan pesan. Edward Depari dan Colin MacAndrews ( dalam Rochajat dan Elvinaro , 2012 :40) menyatakan “saluran komunikasi adalah alat melalui



mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan (*messages*) kepada penerima (*receiver*). Saluran ini dapat dianggap sebagai penerus/ penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi". Selanjutnya, ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dalam hal ini adalah aparatur desa yang menerima atau mendapatkan informasi dari pemerintah. Orang yang menerima pesan harus ditetapkan secara tegas, dan jelas agar informasi yang disampaikan mudah dimengerti. Terakhir ialah efek, yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Efek ini akan menimbulkan umpan balik apakah sipenerima pesan dapat memahami atau tidak. Karena itu, komunikasi yang efektif apabila terdapat reaksi sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Dengan demikian kesuksesan seorang pemimpin apabila mampu menciptakan komunikasi yang efektif antara komunikan dan komunikator yaitu pemimpin itu sendiri (Sitorus,2010)

Dari berbagai pemaparan tadi dapat dikatakan sebagai faktor penentu dalam proses pembangunan maupun penggerakkan masyarakat, maka Kepala Desa sebagai pemimpin harus senantiasa berkomunikasi dengan semua pihak, baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) organisasi secara formal maupun informal. Suksesnya pelaksanaan tugas pemimpin, sebagian besar ditentukan oleh kemahirannya menjalin komunikasi yang tepat dengan semua pihak, secara horisontal maupun vertikal ke atas dan ke bawah. Dalam kaitannya dengan pembedayaan, dapat diungkap seberapa besar pemimpin atau Kepala Desa sebagai agen pembangunan, katalisator, fasilitator mampu menyampaikan pesan,

perintah dan setiap informasi atau kebijakan secara jelas kepada masyarakat. Bagaimana saluran-saluran (media) yang digunakanan cocok dengan situasi kondisi dan latar belakang khalayak sasaran. Seberapa besar tingkat keterbukaan dan intensitas komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait sehingga dapat memperluas dukungan dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya pembangunan perdesaan. Untuk merubah sikap, perilaku masyarakat diperlukan komunikasi organisasi yang efektif, agar pesan-pesan atau program-program pembangunan yang dapat diterapkan dan diterima lingkungannya (Prastyanti, 2012)

Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, Edwards III (1980:10) dalam Sitorus (2010) menegaskan :

*For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.*

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab terhadap implementasi sebuah kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai

masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuat kebijakan.

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari pembuat kebijakan. Dengan demikian instruksi implementasi tidak tertransmisikan dan terdistorsi dalam proses transmisi. Inkonsistensi dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, petunjuk-petunjuk yang terlalu detail dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaptasi (Sitorus, 2010)

Persyaratan pertama supaya implementasi kebijakan dapat berfungsi efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya. Banyak hambatan transmisi komunikasi mengenai implementasi sebuah kebijakan. Jika sebuah kebijakan hendak diimplementasikan

secara sempurna, maka instruksi implementasi tidak hanya dapat diterima saja tapi pesan-pesan di dalamnya pun harus dapat diterima dengan jelas. Jika tidak, para pelaksana akan kesulitan mengenai tindakan yang harus dilakukan, mereka akan leluasa menafsirkan implementasi kebijakan tersebut, sebuah penafsiran yang mungkin saja berbeda dengan maksud atasannya. Tegasnya, bahwa apa yang dikomunikasikan dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan, mesti memperhatikan dan didukung oleh sistem transmisi yang baik, konsistensi dan kejelasan pesan dan perintah dari pembuat kebijakan, yang harus dijalankan oleh implementor kebijakan secara baik, benar, dan prosedural (Rayinda, 2013)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti

apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Sitorus, 2010)

## 2. Pembangunan Masyarakat Perdesaan

Pembangunan masyarakat desa sebagai bagian dari pembangunan sosial diarahkan pada aspek kelembagaan dan peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Combs & Manzoor (1980 : 13) dalam Enthang (2007) menjelaskan bahwa penduduklah yang sering menjadi masalah utama negara-negara miskin dan berkembang.

Rogers (1976) dalam Prastyanti (2012) menyatakan bahwa: "Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksud untuk kemajuan sosial dan material ( termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) bagi mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan". Dari defenisi tersebut jelas dapat diketahui bahwa esensi pembangunan adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik pada segala bidang bagi mayoritas elemen masyarakat. Perubahan tersebut dapat dicapai apabila ada partisipasi yang luas dari masyarakat dalam proses pembangunan. Rasa memiliki terhadap pembangunan yang sedang berlangsung juga akan berdampak pada meningkatnya kontrol masyarakat terhadap lingkungannya. Sampson and Raudenbush ( Prastyanti : 2012), berpendapat bahwa warga masyarakat tidak dapat bertindak ketika di antara mereka tidak ada rasa saling percaya serta ketidakjelasan aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Soetomo (2006) dalam Prastiyanti (2012) menyatakan bahwa dalam proses pembangunan fokus utamanya adalah membangun aspek masyarakat dan manusianya.

Penempatan masyarakat sebagai sentral dalam proses pembangunan menjadikan pembangunan masyarakat diposisikan sebagai salah satu unsur utama dalam konsep pembangunan masyarakat. Unsur – unsur yang utama tersebut adalah: (1) adanya proses perubahan, (2) mobilisasi atau pemanfaatan sumber daya, (3) pengembangan kapasitas masyarakat. Lebih lanjut Usman (2004) dalam Prastyanti (2012), menambahkan bahwa sebaiknya program pembangunan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai transformasi sosial dengan landasan nilai-nilai yang berpusat pada manusia (*people centered development*), dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk mengolah sumber daya produktif sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan mereka. Senada dengan pendapat Soetomo dan Usman, bahwa pembangunan akan bermakna apabila pembangunan bersifat memasyarakat, maksudnya adalah masyarakat tidak hanya terlibat aktif dalam proses pembangunan, namun pembangunan tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat. Kesesuaian antara kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat dengan fokus atau program-program pembangunan yang dilaksanakan akan membuat pembangunan tersebut menjadi bermakna dan sesuai dengan esensi pembangunan. Seiring dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional maupun global berimplikasi pada perubahan kebijakan sistem pemerintahan, maka diperlukan suatu strategi atau arah kebijakan pembangunan yang bersifat terpadu yang pada dasarnya

mempunyai tiga arah (Sumodiningrat, 1999 : 191) dalam Enthang (2007), yakni :

*Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.

*Kedua*, pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

*Ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Dari pemikiran tersebut, nampak bahwa upaya pemberdayaan masyarakat selain memerlukan instrumen melalui berbagai program (bantuan, dana), sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM. Sedangkan instrumen tadi tidak akan berarti tanpa ada penguatan lembaga lokal baik pemerintahan desa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Aparat desa harus mampu menampung aspirasi, menggali potensi, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Sejalan dengan berbagai strategi di atas, perubahan kebijakan pemerintah yang mengedepankan semangat desentralisasi sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara filosofis, sosiologis dan administratif menunjukkan adanya pergeseran orientasi penyelenggaraan administrasi pembangunan dan manajemen pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Ini berarti pada level suprastruktur, menghendaki adanya reformasi sistem pengelolaan pembangunan yang merubah fungsi dan peran birokrasi pemerintah sebagai fasilitator, katalisator melalui pelayanan yang lebih berpihak pada masyarakat. Sedangkan pada level infra struktur



(masyarakat) memberi ruang terhadap aktualisasi pelaksanaan dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam menjabarkan, menerapkan dan menata kelembagaan lokal dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “ *people – centered, participatory, empowering, and sustainable* “ ( Chamber, 1995 : Kartasasmita, 1996:142).

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996:144). Sejalan dengan pemahaman tersebut, konsep pemberdayaan merupakan ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dirinya sendiri (Pranarka dan Tjokrowinoto, 1996 : 56) dalam Kartasasmita(1996 : 145). Karena itu, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu : *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun

aset material guna membangun kemandirian melalui institusi. Upaya ini bisa dilakukan melalui pemberian kuasa dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berbagai kegiatan, program yang mereka butuhkan sesuai kondisi dan kemampuan sumber-sumber yang ada. Kedua, proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau kelompok agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses menstimulasi bisa dilakukan melalui upaya pemberdayaan meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mengembangkan potensi diri dengan berbagai pelatihan ketrampilan dan serta bantuan teknis lainnya.

Menurut The Webster & Oxford English Dictionary, kata *empowerment* mengandung dua arti. Pengertian *pertama* adalah *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). *Kedua* berarti *to give ability to or enable* (sebagai upaya memberi kemampuan atau keberdayaan). Sementara itu, Dubois dan Miley (1986 : 12) dalam Enthang, 2007 menyatakan bahwa Pemberdayaan (*empowerment*) :

*“A process through which people become strong enough to participate within, share in the control of and influence events and institution of affecting their lives (and that in part) empowerment necessitates that people gain particular skills, knowledge, and sufficient power to influence their lives and the lives those they care about”.*

Jadi pemberdayaan merupakan proses yang menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan. Dengan demikian dalam proses pemberdayaan, setiap

individu, kelompok, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tadi, maka inti pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Kartasasminta, 1996 : 145). Sedangkan Stewart (1994 : 47) dalam Enthang, 2007 menyebutkan, inti pemberdayaan adalah membuat mampu (*enabling*). Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa hakekat pemberdayaan itu tiada lain merupakan suatu upaya yang dilakukan individu, kelompok, organisasi atau negara dalam kerangka peningkatan kekuatan, pemberian keberdayaan atau otoritas, pelimpahan kekuasaan atau wewenang terhadap suatu komunitas atau masyarakat tertentu yang dipandang kurang memiliki keberdayaan. Hal ini berguna untuk memperoleh akses terhadap berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, hukum, maupun politik agar dapat ikut terlibat (berpartisipasi) dalam perumusan kebijakan politik maupun pelaksanaan program pembangunan guna menata kehidupan yang lebih demokratis. Senada pemikiran tadi, pemberdayaan dapat dipahami dari berbagai perspektif yang dapat dikembangkan satu dengan lainnya saling terkait, pemberdayaan dapat dilihat dari perspektif sosial, Ekonomi, politik dan psikologis (Friedmenn, 1992: Kartasasmita 1996 : 142). Pendapat lain menyebutkan 4 perspektif pemberdayaan yakni pemberdayaan politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan lingkungan. (Ndraha, 2003:80-81). Dari beberapa pendapat tadi dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Pertama*, dari perspektif politik. Konsep sentral pemberdayaan adalah power (Hanna and Robinson, 1994 ) dalam Enthang, 2007. Pemberdayaan merupakan proses menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan politik, yakni kekuasaan yang dimiliki pemerintah atau negara yang dikonfrontasikan dengan rakyat atau masyarakat. Pemberdayaan Politik, bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap yang terperintah. *Kedua* dari perspektif sosial. Pemberdayaan berarti menyangkut akses terhadap sumber-sumber informasi, partisipasi, pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, lembaga-lembaga sosial dan lembaga keuangan. Dalam logika seperti ini, pemberdayaan dari ketidakberdayaan dapat dicapai dalam keteraturan dan dinamisasi kehidupan masyarakat yang ada tanpa dampak negatif yang signifikan terhadap power yang besar. Pemberdayaan Sosial, bertujuan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (*human invesment*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia. *Ketiga*, Pemberdayaan Ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daya masyarakat dalam mengatasi dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, lebih banyak bertumpu pada kemampuan untuk meningkatkan daya beli atau pendapatan mereka melalui berbagai usaha produktif. *Keempat*, perspektif psikologis, yakni digambarkan rasa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan rasa percaya diri (Pranarka dan Tjokrowinoto, 1996 : 61) dalam Enthang (2007).

Pemberdayaan psikologis berarti berkembangnya motivasi, kreasi, rasa memiliki, kebersamaan, martabat dan harga diri manusia, hasrat dan kebebasan seseorang terhadap lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Rasa potensi diri akan memberi pengaruh positif untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya. Suatu masyarakat yang berdaya berarti masyarakat mampu membangun dirinya sendiri (*self development*), menciptakan kelompok kerja yang dinamis (*groups dynamics*), dan merubah perilakunya (*changing behavior*) dengan meninggalkan kebiasaan yang lebih menguntungkan dalam melakukan kegiatan.

#### 4. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi menurut Meter dan Horn dalam Rayinda (2013), lebih mengarah pada batasan dalam implementasi yang diinterpretasikan sebagai: tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Gow dan Morss dalam Rayinda (2013) mengemukakan hambatan yang ditemui dalam implementasi terdiri dari hambatan politik, ekonomi, lingkungan kelemahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif, kekurangan dalam bantuan teknis, kurangnya desentralisasi dan partisipasi, pengaturan waktu, sistem informasi yang kurang mendukung, perbedaan agenda tujuan antar

aktor pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12) dalam Rayinda( 2013) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. derajat perubahan yang akan diinginkan.
4. kedudukan pembuat kebijakan.
5. siapa pelaksana program.
6. sumberdaya yang dikerahkan.

Sedang konteks kebijakan mencakup :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga dan penguasa.
3. kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan .

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11) dalam Cory (2006), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;

- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam jurnal Ilmiah Cory (2006), mengatakan bahwa ,yaitu:

*"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian".*

Dari pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Sementara Budi Winarno (2002) dalam Prasojo (2010 : 98), yang mengatakan bahwa:

*“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.*

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

#### 1). Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel



dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

### 2). Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

### 3). Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

#### 4). Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

### 5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Nogi , merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nogi mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:

1. *effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
2. *performance evaluation*, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
3. *adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan

4. *efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
  5. *process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Anderson (1979) dalam Nogi : “Evaluasi adalah the *appraisal of assesstment of policy including its content implementation and impact* (penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya). Jones (1987) dalam Nogi Evaluasi : “*an activity designed to judges the merits of government programs which varies significancy in the spesificationof objects, the techniques measurement and methods of analysis* (suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program- program yang berbeda secara tajam dalam spesifikasi obyeknya, tehnik pengukurannya serta metode analisisnya)

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu ( Kajian Empiris)**

Penelitian yang dilakukan oleh H. Enthang Adhy Muchtar (2007) dengan judul “ Pengaruh Komunikasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Cianjur”. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 15, didapat koefisien korelasi variabel Komunikasi terhadap variabel pemberdayaan masyarakat dengan hasil  $r = 0,3735$ , ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara dimensi komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat. Karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai dimensi komunikasi maka semakin besar pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *path analysis* menunjukkan adanya pengaruh komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Y), seperti ditunjukkan dari hasil perhitungan ternyata diperoleh koefisien sebesar 0,3735, koefisien determinasinya sebesar 0,2107. Hal ini berarti bahwa 0,2107 proporsi variabel pemberdayaan masyarakat diterangkan oleh variabel komunikasi, hubungan ini signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Ini berarti, semakin efektif proses komunikasi akan semakin tinggi pula derajat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Penelitian tentang topik yang dibahas, pernah dilakukan oleh peneliti Akadun (2002) yang mengupas tentang “Model Keberdayaan Aparatur Birokrasi Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Di Kabupaten Bandung”. Penelitian tersebut mengambil objek aparat pemerintah dan penduduk Kabupaten Bandung yang memperoleh pelayanan dari Dinas/Badan/Instansi di Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan jumlah sampel sebanyak 116 orang. Model keberdayaan yang diukur/diuji dengan mengelaborasi pendapat dari Friedman, yaitu dari keberdayaan sosial,

politik, dan psikologis. Kesimpulannya, bahwa keberdayaan sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintah, sedangkan keberdayaan politik dan keberdayaan psikologis menjadi faktor proaktif dan dinamisator bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Dalam penelitian tersebut, nampaknya kurang banyak dibahas mengenai masalah keberdayaan aparatur birokrasi dengan lingkungan organisasi dan kemampuan sumber daya non manusia maupun peran masyarakat dan dunia usaha dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Ginting (2010) dengan judul “ Pengaruh Komunikasi Internal terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Herna Medan”. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Herna Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Survey Explanatory*. Populasi dalam penelitian ini petugas medis dan non medis sebanyak 342 orang, dengan jumlah sampel 77 orang, yang diambil dengan *teknik stratified sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi vertikal ( $p = 0,013$ ) dan komunikasi horizontal ( $p = 0,029$ ) mempunyai pengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Herna Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas (2004) dengan judul . “Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar (Suatu Studi Komunikasi Pendidikan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat intensitas

komunikasi orang tua kepada anaknya dalam meningkatkan prestasi belajar pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengambilan sampel dilakukan secara sistimatis *Random sampling*, sehingga diperoleh sampel sebesar 60 orang siswa dari populasi sebesar 300 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, kuantitatif dan analisis statistik inferensial yaitu regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *intensity* komunikasi orang tua dengan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat prestasi belajar siswa dengan hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah  $\hat{Y} = 5,429 + 0,0334x$  dan diperoleh nilai  $f_h = 5,410$  yang mempunyai nilai  $p = 0,024$  yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Ini berarti model regresi yang diperoleh signifikan dan dapat digunakan untuk menaksir nilai  $y$  apabila  $x$  diketahui, serta nilai determinan  $R^2 = 0,085$  yang berarti ada 8,5 % variasi tingkat prestasi belajar siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar dipengaruhi oleh tingkat intensitas komunikasi orang tua dengan siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rayinda (2013) dengan judul “Komunikasi Pemerintahan yang tepat digunakan dalam Masyarakat Pedesaan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pal IX di Pontianak dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP di Desa Pal IX. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dukungan dan partisipasi masyarakat Desa Pal IX yang belum optimal dalam pelaksanaan

pembuatan e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian mengenai proses komunikasi ini diukur dengan menggunakan komponen keberhasilan komunikasi menurut Harrold Laswell. Komponen tersebut antara lain yang berkaitan dengan komunikator, isi pesan, saluran komunikasi yang digunakan, komunikan dan umpan balik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara komunikasi Pemerintahan Desa Pal IX terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Sungai Kakap Kalimantan Barat . Dengan kata lain bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pal IX dalam menginformasikan program e-KTP kepada masyarakat memiliki pengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan pembuatan e-KTP.

### C. Kerangka Pemikiran

Paralel dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa dari pola sentralistik ke desentralisasi berimplikasi pada perubahan kebijakan sistem pemerintahan, maka diperlukan suatu strategi atau arah kebijakan pembangunan yang bersifat terpadu. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah.

*Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal. (Sumodiningrat, 1999 : 130)

Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah, sehingga mereka memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, kemiskinan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.
- c. Berpartisiapsi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi masa depannya. (Suharto, 2005 : 58).

Sebagai proses, pemberdayaan berarti serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan terutama kelompok lemah dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 2 aspek penting yaitu : *Pertama*, pemberdayaan sebagai proses mengembangkan kemandirian, keswadayaan, memperkuat posisi (*bargaining position*) terhadap setiap keputusan atau kebijakan pemerintah. *Kedua*, sebagai proses memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber-sumber daya, memberikan ruang gerak dan memberi dorongan untuk tumbuh dan berkembangnya kreasi, partisipasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, Tjokroamidjojo menyebutkan beberapa faktor fundamental dalam rangka pemberdayaan yaitu ditentukan oleh “Kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan pendidikan.” (Tjokroamidjojo, 1991 : 226) dalam Enthang (2007)



Komunikasi memegang peranan penting untuk menyebarluaskan berbagai program, kegiatan, kebijakan dan melakukan perubahan serta menjalin hubungan dengan berbagai kelompok atau lembaga terkait. Tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi. Hal ini bertolak dari asumsi bahwa organisasi dan dinamikanya tidak berada dalam isolasi, ia senantiasa berinteraksi ke dalam maupun ke luar organisasi. Seperti dikatakan Tjokroamidjojo (1991 : 227) dalam Enthang ( 2007), bahwa : “Komunikasi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan berbagai perubahan nilai dan sikap yang inheren dalam proses pembaharuan tanpa menimbulkan tekanan, frustrasi dan friksi.” Menyadari pentingnya komunikasi oleh pimpinan dalam suatu organisasi, Lindgren (dalam Enthang, 2007) menyatakan “*Effective leadership means effective communication*”. Hakekat kepemimpinan ialah apa yang si pemimpin komunikasikan dan bagaimana ia mengkomunikasikannya. Karena itulah, maka dinyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang efektif. Ini berarti pula bahwa seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus bisa berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus senantiasa meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hal ini tentunya bukan hanya ditujukan ke dalam anggota organisasi yang bersangkutan (*intern*), tetapi juga kepada lingkungan masyarakat dimana organisasi itu berada (*ekstern*). Dalam kaitannya ini dapat diungkap seberapa besar pemimpin atau Kepala Desa sebagai agen pembangunan, katalisator, fasilitator mampu menyampaikan pesan, perintah dan setiap informasi atau kebijakan secara jelas kepada masyarakat. Bagaimana saluran-saluran

(media) yang digunakan cocok dengan situasi kondisi dan latar belakang khalayak sasaran. Seberapa besar tingkat keterbukaan dan intensitas komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat, baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait sehingga dapat memperluas dukungan dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya pembangunan perdesaan. Untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat diperlukan komunikasi organisasi yang efektif, agar pesan-pesan atau program-program pembangunan yang dapat diterapkan dan diterima lingkungannya. Indikator - indikator dalam menentukan keberhasilan suatu komunikasi pemerintahan dalam suatu organisasi yang sekaligus menjadi barometer pengukuran keberhasilan dari komunikasi pemerintahan.

Ndraha (2003: 231) menjelaskan bahwa proses komunikasi pada dasarnya adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain. Unsur-unsur yang terlibat sekaligus sebagai dimensi-dimensi proses komunikasi pemerintahan meliputi:

1. Komunikator (*Communicator*), yakni orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan.
  - a. Penyampain pesan agar informasi (pesan) itu dapat disampaikan dengan tepat, komunikator harus memiliki kecermatan dalam memilih kata-kata yang tepat dalam merumuskan pesan itu penting dan menentukan agar ide-ide, gagasan-gagasan yang ada itu dapat dituangkan ke dalam lambang-lambang yang bisa dimenegrti oleh penerima, sehingga tidak terjadi salah penafsiran.

- b. Daya tanggap pimpinan, kesuksesan seorang pemimpin apabila mampu menciptakan komunikasi yang efektif antara komunikan dan komunikator yaitu pemimpin itu sendiri, setiap umpan balik dari komunikan adalah masukan yang baik untuk pimpinan.
- c. Daya Empaty, pesan yang disampaikan oleh komunikator hendaknya dapat menimbulkan minat dan perhatian dari komunikannya.

( Sitorus, 2010)

2. Pesan (*message*), yaitu idea, informasi, opini dan sebagainya.
  - a. Kejelasan Pesan, agar informasi (pesan) itu dapat disampaikan dengan tepat komunikator harus memiliki kecermatan, dalam memilih kata-kata yang tepat dalam merumuskan pesan yang bisa dimengerti oleh penerima, sehingga tidak terjadi salah penafsiran.
  - b. Kesesuaian dengan situasi dan kondisi, informasi yang disampaikan kepada komunikan harus secara jelas dan dapat mudah dimengerti, sebab daya tangkap setiap komunikan adalah berbeda-beda.
  - c. Manfaat Perubahan, pesan yang disampaikan oleh komunikator hendaknya dapat menimbulkan minat dan perhatian dari komunikannya sehingga menimbulkan perubahan komunikan sesuai dengan yang diharapkan (sitorus, 2010)

3. Saluran (*channel, media*) ialah alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Edward Depari dan Colin MacAndrews (1985: 16) ( dalam Rochajat dan Elvinaro , 2012 :40) menyatakan "saluran komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan (*messages*) kepada penerima (*receiver*).

Saluran ini dapat dianggap sebagai penerus/ penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi”.

- a. Saluran interpersonal, saluran komunikasi ini mengacu pada komunikasi tatap muka (*face to face communication*) (Bahfiarti, 2012). Saluran antar pribadi merupakan yang paling baik dalam menjaga kredibilitas pesan. Saluran interpersonal memberikan kesempatan terjadinya umpan balik positif dan penguatan seketika khususnya apabila diperlukan perubahan perilaku (Graeff, 1966) dalam Prastyanti (2012).
- b. Forum pertemuan, forum-forum pertemuan atau media sosial ternyata efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat karena sifatnya yang tatap muka membuatnya dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Siregar (1990) dalam Prastyanti (2012).
- c. Pemanfaatan jaringan, pengembangan potensi yang ada pada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya, Giarci (2001) dalam Prastyanti (2012), proses ini berlangsung dengan dukungan *Collective Action* dan *Networking* yang dikembangkan oleh masyarakat.
- d. Pemanfaatan media massa, selain radio televisi juga dipandang berperan dalam mengatasi *knowledge gap* yang terjadi pada

masyarakat. Media penyiaran juga mempunyai potensi yang lebih baik dalam menjangkau khalayak berjumlah besar, dalam waktu cepat dengan ide-ide yang baru ( Nasution, 2002) dalam Rayinda, 2013. Saat ini media massa, dalam hal ini televisi, merupakan sumber informasi terpenting dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar dari masyarakat membiarkan berita menginformasikan kejadian-kejadian penting dan melaporkan secara jujur dan akurat (Fulcher dan Scott, 1999 dalam Pratyanti, 2012).

4. Komunikasikan (*audience*), yaitu orang yang menerima pesan
  - a. Daya respon, orang yang menerima pesan harus ditetapkan secara tegas dan jelas agar informasi yang disampaikan mudah dimengerti.
  - b. Kemampuan berubah,
  - c. Jalinan hubungan,
5. Efek, yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Efek ini akan menimbulkan umpan balik apakah sipenerima pesan dapat memahami atau tidak. Karena itu, komunikasi yang efektif apabila terdapat reaksi sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator (Prastyanti, 2012). Hal ini sangat didukung oleh :
  - a. Dukungan lingkungan,
  - b. Suasana dialogis
  - c. Keterbukaan
  - d. Tindak lanjut.

Rogers (dalam Prastyanti, 2012) bahwa pembangunan harus mengandung unsur informasi secara merata melalui proses komunikasi yang

efektif. Tanpa komunikasi tak mungkin ada informasi dan tanpa informasi transformasi pun tak mungkin terjadi. Dalam hal ini Rogers mensinyalir bahwa terjadinya kegagalan pembangunan perdesaan, salah satu diantaranya adalah disebabkan terjadinya kesenjangan komunikasi sehingga informasi yang diterima masyarakat perdesaan menjadi tidak lengkap. Akibat lanjut dari minimnya aliran informasi yang menuju ke wilayah perdesaan tersebut dapat menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang sekaligus juga menghambat peningkatan kesejahteraan hidup mereka (Taufik, 2010)

Menurut Susanto (1973) dalam Taufik (2010), untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan perdesaan yang tinggi, diperlukan adanya strategi komunikasi yang tepat hanya dengan model komunikasi linier. Dengan saluran komunikasi interaktif dialogis, keberhasilan pembangunan dapat diwujudkan, artinya di antara mereka yang terlibat dalam proses komunikasi terdapat proses saling mempengaruhi, memberi dan menerima informasi secara seimbang, guna membentuk kesamaan pengertian di antara mereka (Hang Kueng, 1994 dalam Taufik, 2010), kelebihan lain dari model komunikasi interaktif adalah adanya kesamaan posisi antara pihak *communicant* dengan *communicator-nya* sehingga di antara mereka yang terlibat komunikasi tidak ada perasaan inferior dan superior, dan hasil komunikasinya dianggap sebagai *sharing* (Taufik, 2010). Keberhasilan Komunikasi interaktif sebagai sarana sosialisasi program pembangunan masyarakat desa ini menurut Rogers dalam Prastiyanti (2012) dikarenakan memiliki kelebihan tidak menggunakan saluran formal, karena masyarakat

pedesaan yang secara sosiologis masih tergolong sebagai *primary society*, yang masih awam dengan saluran-saluran formal. Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komunikasi yang efektif diperlukan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat agar pesan-pesan atau program-program pembangunan dapat diterapkan dan diterima lingkungannya, dalam memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Prastyanti, 2012)

Ukuran keberdayaan dapat dilihat berbagai aspek yaitu diantaranya dari perspektif politik, ekonomi, sosial maupun psikologis (Friedmann, 1992 dalam Kartasasmita, 1996 ).

*Pertama*, dari perspektif politik, diukur melalui akses setiap individu/kelompok terhadap sumber informasi, pendanaan, keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, kesempatan untuk memperoleh informasi secara merata (Hanna and Robinson, 1994 : xii; Paul, 1987 dalam Enthang, 2007). Indikator dalam pemberdayaan dari aspek politik adalah memperkuat posisi (*bargaining position*), pemanfaatan wewenang, peran aktif dan pemihakanan (Kartasasmita, 1996:159)

- a. *Bargaining position*, perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses berbagi peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya,
- b. Wewenang, kejelasan wewenang untuk melakukan pilihan keputusan/tindakan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada,

- c. Peran aktif.
- d. Pemihakan,

*Kedua*, dari perspektif sosial, diukur melalui indikator-indikator :

- a. Akses terhadap informasi, bagaimana masyarakat mampu memiliki akses terhadap *resources* baik material, informasi, maupun kekuasaan, melalui proses penguatan kelembagaan.
- b. Kemudahan dalam pelayanan, untuk dapat berpartisipasi dalam setiap tahap proses pembangunan, memperoleh faktor-faktor produktif dan menentukan pilihan masa depannya sebagai bagian dari dinamika, tanpa menimbulkan hambatan atau konflik yang berarti.
- c. Keswadayaan, adanya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan untuk ikut mengelola proses pemerintahan/pembangunan.
- d. Pemeliharaan gotong royong
- e. Kerjasama sinergis,  
(Kabeer dalam Enthang, 2007).

*Ketiga*, dari perspektif psikologis, yang diukur melalui indikator-indikator :

- a. Sikap terhadap perubahan, berkembangnya rasa potensi individu (*individual sense of potency*). (Pranarka; Moeljarto, 1996 : 61) dalam Enthang 2007. Pemberdayaan psikologis berarti berkembangnya motivasi, rasa percaya diri, rasa memiliki, berkembangnya kreasi, kebersamaan, harga diri manusia, hasrat dan kebebasan seseorang terhadap lingkungan yang mempengaruhi dirinya.
- b. Tanggung Jawab, rasa potensi diri akan memberi pengaruh positif untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya



- c. Kemandirian, menciptakan kelompok kerja yang dinamis (*groups dynamics*),
- d. Keyakinan, merubah perilakunya (*changing behavior*) dengan membiasakan perilaku yang positif yang lebih menguntungkan dalam melakukan kegiatan. .

(Pranarka; Moeljarto, 1996 : 61 dalam Enthang, 2007)

*Keempat*, dari perspektif psikologis, yang diukur melalui indikator-indikator :

- a. Pemanfaatan bantuan,
- b. Realisasi bantuan,
- c. Kelancaran berusaha,
- d. Kemampuan daya beli

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat maka dapat dibuat suatu model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2  
Hubungan Antara Variabel



Keterangan :

X : Variabel independen, yaitu komunikasi

Y : Variabel dependen, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

#### D. Hipotesis Penelitian

Mengacu pada tinjauan pustaka dan kerangka pikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dapatlah dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : Ada pengaruh yang positif “Komunikasi terhadap tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau” yang ditentukan oleh derajat kemampuan komunikator, pesan, media, komunikasi dan umpan balik.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi (X) dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan (Y) di Kabupaten Lamandau.

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi (X) dengan pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan perdesaan (Y) di Kabupaten Lamandau

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode eksplanatory kuantitatif. Metode eksplanatory adalah suatu metode yang menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara cermat, sehingga ditemukan kejadian relatif dan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner, setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif dan pada akhirnya penelitian ini akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian (Singarimbun, 2012:3 cetakan ke 11).

Dengan memperhatikan pada tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta, sifat-sifat dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960 ; Enthang, 2007:24). Sifat verifikatif dalam penelitian ini pun selain memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang diteliti serta menerangkan hubungan antar variabel, juga melakukan pengujian hipotesis, mendapatkan makna dan implikasi dari masalah yang dileliti. (Natsir, 1988 : 64 ; Enthang, 2007:25).

Sesuai dengan fenomena sosial yang tercermin dalam tujuan penelitian tadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode

survey eksplanatori (*explanatory survey*). Penggunaan metode ini dimaksudkan bukan hanya untuk menerangkan konsep dan fakta, peristiwa dewasa ini (*explanation*), tetapi bermaksud menganalisis dan menjelaskan pengaruh kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis". (Singarimbun, 1989 : 5; Rusidi, 1996 : 15). Dengan survey eksplanatori diharapkan dapat mengungkap secara cermat pengaruh pengembangan lembaga desa dalam berkomunikasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan survey bentuk eksplanatori (eksplanasi) artinya bertolak dari variabel yang ada dalam penelitian, tujuannya pengujian hubungan antar variabel (Bulaeng, 2002:120 dalam Ilyas, 2004:57). Desain penelitiannya dalam bentuk skema sebagai berikut:



Keterangan :

X = Tingkat Komunikasi antara kepala desa dengan masyarakat di Kabupaten Lamandau

Y = Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau

## B. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006:119) dalam Ilyas (2004) : "Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian". Sedangkan Gulo (2003:76) dalam Ilyas (2004) : populasi terdiri atas sekelompok obyek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Obyek tersebut satuan analisis. Sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian ini maka guna kepentingan pengumpulan data primer

populasi sasaran atau unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lamandau yang memiliki 8 kecamatan terdiri dari 80 desa dan 3 kelurahan yang terbagi kedalam 3 wilayah, yakni wilayah timur sebanyak 3 kecamatan, wilayah tengah 3 kecamatan dan wilayah barat 2 kecamatan. Dapat dikatakan bahwa populasi penelitian adalah seluruh lembaga desa yang berperan memberdayakan masyarakat desa di Kabupaten Lamandau. Dalam penelitian ini lembaga desa yang dipilih sebagai mana telah diuraikan sebelumnya yakni ditentukan 3 lembaga desa, yakni Tokoh Masyarakat, Badan Pemberdayaan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dengan pertimbangan ketiga lembaga tersebut sama-sama ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan, menentukan arah pembangunan dan mengalami perubahan fungsi, peran serta kedudukan Kepala Desa yang semula menjadi *ex officio* sebagai ketua pada semua lembaga desa, kini terpisah dengan mengembangkan pola hubungan yang lebih didasarkan pada semangat kemitraan.

Tabel 3.1 Wilayah Penelitian dalam Jumlah Populasi

No	Wilayah	Kecamatan	desa	populasi
1	Timur	3	30	90
2	Tengah	3	33	99
3	Barat	2	20	60
Total		8	83	249

Sumber : Lampiran 1

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka pemilihan sampel dilakukan secara "*Proportionate Stratified Random Sampling*". Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin berikut :

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

$$n_0 = \left\{ \frac{z_{1-\alpha}}{2B} \right\}$$

Rumus 3.1 Harun Al Rasyid ( Enthang, 2007)

Dimana :

$$n_0 < 0,05 N \rightarrow n = n_0$$

$$n_0 > 0,05 N \rightarrow n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

Keterangan :

- N = Besarnya Populasi ( $\Sigma$  organisasi )
  - n = Besarnya Sampel
  - $\alpha$  = Resiko kekeliruan yang mungkin terjadi
  - Persentasi (p) = 0,5
  - Derajat Kepercayaan = 95%,  $\alpha = 5\%$
  - Bound of Error (BE) = 8%
- Maka besarnya sampel diperoleh sebesar 94 responden

Setelah diketahui besarnya sampel yang berjumlah 94, maka perlu diketahui besarnya data sampel per wilayah. Dengan menggunakan proporsional untuk masing – masing wilayah , maka dapat diketahui dengan rumus yang dihitung secara *proportionate* dengan cara:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Rumus: 3.2

- $n_i$  = Besarnya sampel wilayah penelitian
- $N_i$  = Jumlah organisasi perwilayah
- N = Besarnya populasi
- n = Total sampel

Dengan menggunakan rumus di atas maka diperoleh sampel per wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Alokasi Sampel Desa per Wilayah Penelitian

No	Wilayah	desa	Populasi	sampel
1	Timur	30	90	34
2	Tengah	33	99	37
3	Barat	20	60	23
Total		83	249	31

Sumber : Hasil penelitian, diolah, 2014

Setelah diketahui besarnya sampel per wilayah yang berjumlah 94, maka perlu diketahui besarnya desa sampel dengan membagi 3, karena tiap desa diwakili oleh 3 lembaga desa, maka diperoleh 31 desa sampel, maka dapat diketahui besarnya desa sampel per wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Alokasi desa Sampel per Wilayah Penelitian.

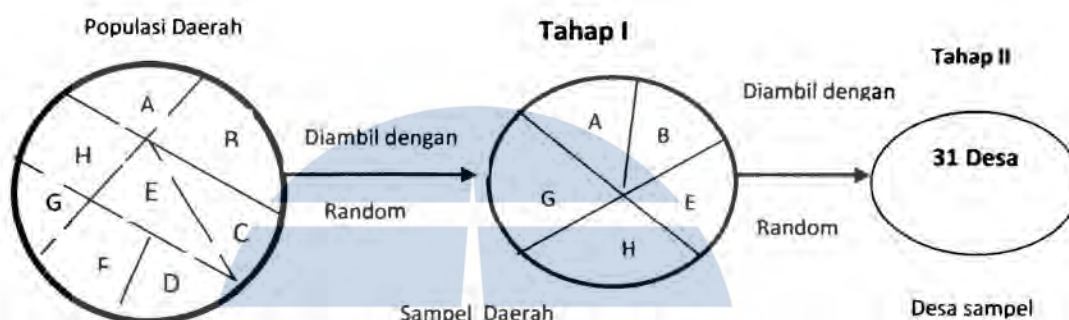
No	Wilayah	desa	Populasi	sampel	Desa sampel
1	Timur	30	90	34	11
2	Tengah	33	99	37	12
3	Barat	20	60	23	8
Total		83	249	94	31

Sumber : Penelitian, diolah, 2014

Dari tabel tersebut dapat diuraikan, selain pemilihan sampel dilakukan secara *Proportionate Stratified Random sampling*, karena pemilihan lokasi penelitian mencakup wilayah yang luas yaitu Kabupaten Lamandau secara keseluruhan, yang populasinya memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata. juga dilakukan dengan *sampling*. Tekni penentuan sampel dilakukan dengan teknik *sampling cluster* (area sampling) dua tahap atau *Two stage cluster sampling* ( Sugiyono, 2007 : 59). Tahap pertama yaitu menentukan sampel kecamatan dari jumlah kecamatan sebanyak 8 kecamatan di tiga wilayah yaitu timur, tengah dan barat dipilih 5 kecamatan. Selanjutnya dari kecamatan yang

terpilih dilanjutkan dengan menentukan desa sampel sebanyak 31 desa. Dari 31 desa yang terpilih ini yang menjadi respondennya adalah dari setiap desa ada tiga orang yaitu dari Tokoh Masyarakat, Badan Pemberdayaan Desa dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat, sehingga total sampel atau kuisisioner berjumlah 94 orang. Teknik ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Teknik Penentuan sampel penelitian



### C. Instrumen Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memerlukan instrument penelitian/alat bantu penelitian yang berbeda. Disamping itu, pemilihan instrument penelitian sangat tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang akan dikumpulkan. Perkembangan teknologi juga telah memberikan tambahan alternatif instrument penelitian seperti kamera foto, kamera video, tape recorder, computer dan foto copy, yang kesemuanya akan berpengaruh pada kemampuan penelitian dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Sehubungan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif maka instrument dalam penelitian ini adalah panduan kuesioner (daftar pertanyaan angket).

Menurut Sugiyono (2008:102) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah "alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam



maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian". Jadi instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti, dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan melalui saluran komunikasi langsung (interpersonal) maupun media komunikasi tertentu yang bertujuan untuk merubah pengertian, kepercayaan, sikap dan tindakan penerimanya. Komunikasi dalam penelitian ini diorientasikan pada komunikasi pimpinan dalam hal ini lebih ditekankan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa dalam rangka penyebaran informasi/pesan-pesan, pemberian pengertian yang dapat menimbulkan perubahan sikap-sikap, kepercayaan dan memperoleh dukungan lingkungan masyarakat.

### **2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan**

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses memberikan daya, kekuatan kepada masyarakat dalam mengurus berbagai kegiatan, program yang dibutuhkan agar memiliki kemampuan dan kemandirian. Pemberdayaan juga berarti proses menstimuli, mendorong dan memotivasi masyarakat dengan berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan agar memiliki keberdayaan baik

secara sosial, ekonomi, politik maupun psikologis. Jadi pemberdayaan diukur dari aspek proses dan produk yakni bagaimana menstimuli, memberikan daya dan dari aspek hasilnya, yakni dalam bentuk tingkat keberdayaan baik sosial, ekonomi, politik maupun psikologis. Untuk menggambarkan mengenai operasionalisasi variabel, maka penulis sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4.Operasionalisasi Variabel Bebas

No	Variabel	Dimensi	Indikator	pertanyaan
	Komunikasi	Komunikator	- Penyampaian pesan	1
			- Daya tanggap pimpinan	2
			- Daya empati	3
			- Katalisator	4
		Pesan	- Kejelasan pesan	5
			- Kesesuaian dengan sikon	6
			- Manfaat perubahan	7
		Media	- Saluran interpersonal	8
			- Forum pertemuan	9
			- Intensitas pertemuan	10
			- Pemanfaatan jaringan	11
			- pemamfatan media massa	12
		Komunikan	- Daya respon	13
			- Kemampuan berubah	14
			- Jalinan hubungan	15,16
		Umpan Balik	- Dukungan lingkungan	17
			- Suasana dialogis	18
			- Keterbukaan	19
			- Tindak lanjut	20

Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel Terikat

No	Variabel	Dimensi	Indikator	pertanyaan
	Pemberdayaan	Sosial	- Akses terhadap informasi	21
			- Kemudahan dalam pelayanan	22
			- Keswadayaan	23
			- Pemeliharaan gotong royong	24
			- Kerjasama sinergis	25
		Politis	- Kemampuan bargaining	26
			- Pemamfaatan wewenang	27
			- Peran aktif	28
			- Pemihakan	29
		Ekonomis	- Pemanfaatan bantuan	30
			- Realisasi bantuan.	31
			- Kelancaran berusaha	32
			- Kemampuan daya beli.	33
		Psikologis	- Sikap terhadap perubahan	34,35
			- Tanggung jawab.	36
			- Kemandirian	37
			- Keyakinan	38

## C. Uji Validitas dan Reabilitas

### 1. Uji Validitas

Dalam penelitian yang menggunakan data primer, informasi yang digunakan seharusnya merupakan informasi yang dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengujian validitas terhadap kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian (Irawan, 2011). Menurut Singarimbun (1995), validitas menunjukkan sejauh mana

suatu alat pengukur tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur.

Adapun langkah-langkah dalam pengujian validitas adalah sebagai berikut :

- a. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur
- b. Melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada sejumlah responden.
- c. Mempersiapkan tabulasi jawaban
- d. Menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* ( $r$ ) yang dinyatakan sebagai berikut (Singarimbun, 1995) :

$$r_{i(x-i)} = \left[ \frac{r_{ix}S_x - S_i}{\sqrt{S_x^2 + S_i^2 - 2r_{ix}S_iS_x}} \right]$$

Dimana  $r_{ix}$  merupakan korelasi *Product Moment* :

$$r_{ix} = \frac{n\sum ix - \sum i \sum x}{\sqrt{(n\sum i^2 - (\sum i)^2)(n\sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

Keterangan :

- $r_{ix}$  : Korelasi antara instrument pertanyaan secara keseluruhan  
 $S_i$  : Varians jawaban responden untuk instrumen ke  $i$   
 $S_x$  : Varians jawaban responden untuk keseluruhan instrumen  
 $\sum X$  : Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen  
 $\sum i$  : Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke  $i$   
 $\sum X^2$  : Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen yang di kuadratkan.  
 $\sum i^2$  : Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke  $i$ , yang dikuadratkan

- e. Kriteria untuk menguji apakah butir ke- $i$  yang digunakan valid atau tidak adalah dengan nilai  $r_{ix}$  yang dibandingkan dengan  $r$  tabel *product moment* pada  $\alpha$  tertentu. Jika nilai koefisien korelasi ( $r$ ) yang diperoleh  $\geq$  dari koefisien ( $r$ ) di tabel maka butir instrumen yang diuji

cobakan tersebut dinyatakan valid atau jika nilai signifikansi ( $p$ -value) pada perhitungan bivariate correlate  $\leq \alpha$  (tingkat signifikansi) maka butir tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini perhitungan validitas pada variabel komunikasi (komunikator, pesan, media, komunikan dan umpan balik ) dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan (sosial, politik, ekonomi dan psikologis) menggunakan perhitungan korelasi *product moment* karena menggunakan skala *Linkert's* dengan lima pilihan jawaban.

## 2. Uji Reliabilitas

Selain pengujian validitas yang telah dilakukan sebelumnya, sebuah kuesioner juga harus memenuhi persyaratan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Irawan, 2011). Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat tersebut reliabel. Dipertegas oleh Arikunto (2006), instrumen baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang dapat dipercaya/reliabel menghasilkan data yang dapat dipercaya juga, sedangkan data yang dipercaya/sesuai dengan kenyataannya, maka berapapun diambil akan tetap menghasilkan data yang sama. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Singarimbun, 1995). Untuk mengukur reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

konsistensi internal karena variabel yang akan diuji reliabilitasnya bukan data dikotomi (Sugiyono, 2007). Indeks reliabilitas dapat ditunjukkan melalui besarnya nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

Formulasi untuk menghitung  $\alpha$  adalah sebagai berikut :

$$\alpha = \left[ \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right) \right]$$

Keterangan :

$k$  : Jumlah instrumen pertanyaan  
 $\sum S_i^2$  : Jumlah varians dari tiap instrumen  
 $S_x^2$  : Varians dari keseluruhan instrumen

$$S_i^2 = (\sum X_i^2)/n - (\sum X_i)^2/n$$

$$S_x^2 = (Jki)/n - (JKs)/n^2$$

Dimana :

$Jki$  : Jumlah Kuadrat seluruh skor

$JKs$  : Jumlah Kuadrat Subjek

Sementara validitas pengukuran dalam penelitian ini terkait dengan validitas konstruksi (*construct validity*). Validitas konstruksi ini lebih terarah pada pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang diukur oleh alat pengukur yang ada (Setiaji, 2004: 59) dalam singarimbun (1995) Artinya bahwa validitas konstruksi berkaitan dengan pengertian, kegunaan atau manfaat dan asosiasi variabel-variabel terukur atau teramati tersebut dengan sebuah variabel tidak terukur atau lebih yang menjadi sasaran utama, yang secara teoritis dinyatakan mempunyai asosiasi. Jika r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka

butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk hasil analisis bisa dilihat pada output uji reliabilitas (lampiran).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, melalui studi kepustakaan data dikumpulkan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai referensi, peraturan-peraturan perundangan, kebijakan laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta lembaga desa lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Observasi, yaitu dengan jalan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat mengenai masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dengan observasi diarahkan untuk memperoleh gambaran empirik berupa data yang relevan berupa kondisi dan situasi lapangan.
3. Wawancara, yaitu dilakukan dengan para pejabat yang berkompeten baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan para tokoh masyarakat tingkat desa, yang menjadi objek penelitian guna membantu memahami gejala sosial yang timbul secara cermat dan kritis.
4. Kuesioner, dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen pokok untuk menjaring sejumlah data yang relevan. Dengan kuesioner dapat mengungkapkan data yang menyangkut persepsi dan sikap untuk

mengukur setiap indikator dari masing-masing variabel penelitian digunakan pertanyaan dengan lima kategori jawaban. Sugiono (2008:93) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial”. Skala Likert diberi skor yang telah ditentukan untuk memudahkan perhitungan lebih lanjut. Skala Linkert terdiri dari lima kriteria dengan nilai skor yang berkisar antara 1 sampai dengan 5 dengan interval penilaian untuk setiap jawaban responden adalah 1 sampai dengan 5

5. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban pilihan tersebut dengan menggunakan interval nilai 1 sampai 5.

Dalam penyusunan kuesioner, penulis menggunakan model skala *Likert's* dengan metode *summated ratings*. Menurut Vredembregt (1996) dalam Enthang (2007) skala Likert's tersebut merupakan skala ordinal. Setelah Pertanyaan-pertanyaan setiap indeks ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan skor untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Skor ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor gabungan. Ada dua keputusan yang harus dibuat yaitu keputusan tentang jenjang (*range*) skor untuk indeks yang disusun. Biasanya peneliti menginginkan range yang cukup besar sehingga informasi yang dikumpulkan lengkap seperti Jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5), atau jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Jenjang mana yang cocok untuk digunakan amat tergantung pada populasi penelitian. Bila populasi penelitian adalah kelompok masyarakat yang terdidik sehingga mampu membedakan pendapatnya secara lebih tajam, maka dapat digunakan jawaban yang berjenjang lebih besar. Pada masyarakat perdesaan, jawaban



yang berjenjang 3 atau 5 adalah yang lebih sesuai (Singarimbun, 2012 :111). Oleh karena itu agar dapat dilakukan pengujian hipotesis penelitian ini dengan *path analysis* (analisis jalur), maka data yang diperoleh dengan skala *Likert's* perlu dinaikkan menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (Al Rasyid,1994: Enthang,2007)

#### E. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan analisis instrumen penelitian, selanjutnya jika instrumen tersebut valid, reliabel dan konsisten, selanjutnya nilai jawaban responden diubah skalanya menjadi skala pengukuran interval dengan menggunakan *Metode Successive Interval* yang caranya dilakukan menurut Al Rasyid,1994 dalam Enthang,2007 seperti berikut ini :

- a) Perhatikan nilai jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner
- b) untuk setiap pertanyaan tersebut, lakukan perhitungan ada berapa responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4, 5 = frekuensi ( f )
- c) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya = ( p )
- d) Kemudian hitung proporsi kumulatifnya ( pk )
- e) Dengan menggunakan tabel normal, dihitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh
- f) Tentukan nilai densitas normal ( fd ) yang sesuai dengan nilai Z
- g) Tentukan nilai interval (*scale value* ) untuk setiap skor jawaban dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Scale Value} = \frac{(\text{Density at lower Limit}) - (\text{Density at Upper Limit})}{(\text{area below Upper Limit}) - (\text{Area Below Lower Limit})}$$

- h) Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu Skala Value (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan jawaban responden yang terkecil melalui transformasi berikut ini.

$$\text{Transformed Scale Value} : SV = SV + \{ SV \text{ min} \} + 1$$

Sesuai dengan hipotesis dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka analisis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Disamping itu, untuk lebih memahami fenomena yang diamati, maka dilengkapi juga dengan analisis kualitatif yakni melalui metode deskriptif. Dalam analisis data kualitatif yaitu didasarkan pada hasil distribusi skor data yang diperoleh dengan skor data yang tertinggi yang dicapai. Dari perbandingan nilai tersebut, sehingga dapat diungkap keadaan atau tingkat kemampuan variabel-variabel yang diteliti. Adapun mengenai uji hipotesis yang digunakan dalam analisis kuantitatif digunakan analisis korelasi dan analisis jalur.

### **Pengujian Koefisien Jalur**

Sebelum mengambil kesimpulan mengenai hubungan kausal yang telah digambarkan dalam diagram jalur, terlebih dahulu diuji keberartian untuk setiap koefisien jalur yang telah dihitung. Untuk menguji koefisien jalur tersebut dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : secara keseluruhan (*overall*) dan secara individual.

### Pengujian Secara Keseluruhan

Hipotesis pada pengujian secara keseluruhan ini adalah:

$$H_0 : \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \dots = \rho_{yxk} = 0$$

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat

H1: Sekurang-kurangnya ada sebuah  $\rho_{Yxi} \neq 0$  Terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Koefisien korelasi dihitung dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* (Sugiyono, 2007) sebagai berikut:

#### Keterangan :

$r_{xy}$  : Korelasi antara instrument variabel Komunikasi dengan Pemberdayaan Masyarakat

$\sum X$  : Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen Komunikasi

$\sum Y$  : Jumlah jawaban responden untuk instrumen Variabel Pemberdayaan Masyarakat

$\sum X^2$  : Jumlah jawaban responden untuk instrumen Komunikasi yang di kuadratkan.

$\sum y^2$  : Jumlah jawaban responden untuk instrumen Pemberdayaan yang dikuadratkan

$n$  : Jumlah responden

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel berikut (Sugiyono, 2007)

Tabel 3.6 Pedoman untuk Memberi Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2007

Dengan statistik uji F pada Tabel ANOVA :

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2_{yx_1x_2 \dots x_k}}{k(1 - R^2_{yx_1x_2 \dots x_k})}$$

Dengan derajat bebas  $V_1$ (pembilang) = k dan  $V_2$  (penyebut) = n-k-1 tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ ,  $V_1, V_2$  bandingkan nilai signifikansi pada tabel distribusi nilai F, dengan nilai  $\alpha$ , jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.

Hipotesis statistik yang akan diuji :

$H_0 : \rho_{Yx_i} = 0$  : Faktor Komunikasi tidak berpengaruh nyata terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lamandau

$H_1 : \rho_{Yx_i} \neq 0$  : Faktor Komunikasi berpengaruh nyata terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lamandau

Rumus pengujian Hipotesis Penelitian dengan uji t:

$$t = \frac{n\sqrt{(n-1-k)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{table} = t_{(1-\alpha/2; n-k-1)}$  atau  $t_{hitung} < t_{((1-\alpha/2; n-k-1)}$

Jika dari hasil pengujian koefisien korelasi antara variabel X signifikan, hal itu menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang nyata antara faktor komunikasi dengan Pemberdayaan Masyarakat.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau secara geografis terletak berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni di antara  $1^{\circ} 9$  s.d  $3^{\circ}36$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}25$  s.d  $112^{\circ}50$  Bujur Timur. Letak Kabupaten Lamandau sangat strategis yang berada pada jalur regional dan sebagai urat nadi mobilitas penduduk, barang dan jasa antar 2 Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Posisi tersebut telah memberikan peluang dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lamandau. Dengan keanekaragaman kegiatan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga menunjukkan kontribusi yang begitu besar dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor termasuk pembangunan perdesaan. Luas wilayah Kabupaten Lamandau adalah  $7.856 \text{ km}^2$  yang secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sebelah Timur adalah Kecamatan Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sebelah Selatan adalah Kabupaten Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara

dan sebelah Barat adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Secara geografis wilayah Kabupaten Lamandau terletak pada ketinggian yang berkisar antara 20 – 50 meter di atas permukaan laut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Cakupan wilayah administratif pada awal berdirinya, Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, 3 Kelurahan dan 80 Desa dengan perkembangan pemerintah maupun tuntutan pada pelayanan masyarakat, di Kabupaten Lamandau dibentuk 8 kecamatan pemekaran dari yang sebelumnya sejak tahun 2005.

Topografi Kabupaten Lamandau dibagi menjadi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit, yang terdiri dari sebelah utara adalah pegunungan dan tanah litosol tahan terhadap erosi. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning, juga tahan terhadap erosi, sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa aluvia organosol banyak mengandung air. Kemiringan lahan di Kabupaten Lamandau terbesar dengan indeks kemiringan 0 s.d > 15 % dan digunakan sebagai lahan pertanian sebesar 39,587 Ha ( BAPPEDA, 2012).

Kabupaten Lamandau adalah Kabupaten Pemekaran yang dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Sebagai Kabupaten pemekaran tentu saja banyak hal yang menjadi pekerjaan

rumah bagi pemerintah daerah. Kabupaten Lamandau terbentuk dengan karakteristik sebagai berikut:

- Luas 7.856 km<sup>2</sup>
- Jumlah Penduduk 79.209 jiwa
- Jumlah Kecamatan : 8 Kecamatan
- Jumlah Kelurahan : 3 Kelurahan
- Jumlah Desa : 80 Desa
- Suku yang ada : Dayak , Melayu, Jawa, Sunda, Flores, Bima, Banjar dan Toraja

Potensi mata pencaharian dan produk unggulan yang menjadi sumber daya alam maupun manusia dalam rangka perwujudan *Good Governance* adalah:

- a. Potensi Sumber Daya Alam adalah kehutanan, pertambangan (biji besi), lahan pertanian dan perkebunan;
- b. Mata Pencaharian, bertani, berkebun, pedagang, karyawan swasta dan buru.
- c. Produk Unggulan : tambang, sawit, karet dan gaharu

## **2. Visi dan Misi Daerah Kabupaten Lamandau.**

Dalam menjalankan pemerintahan dalam bingkai otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik :

### **a. Visi**

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN,



yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

**b. Misi**

1. Membangun ekonomi kerakyatan dengan cara memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan diversifikasi usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan memperkuat pengembangan UKM dan koperasi serta industri kecil.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan pendidikan yang berkualitas mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat mulai dari kota dan dikembangkan sampai dengan ke desa-desa.
4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau dimanapun ia berada.
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar supaya berkembang dan menyerap manfaat pembangunan serta lancarnya arus angkutan umum maupun distribusi barang dan jasa.
6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan (*event*) baik antar daerah kabupaten,propinsi maupun di tingkat nasional.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN menuju pembangunan yang berkelanjutan.

8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

#### **a. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 adalah :

1. Memperbaiki lingkungan usaha agar kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
2. Peningkatkan akses usaha kelompok kepada sumber daya produktif
3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan produktivitas usaha

Sejalan dengan strategi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal ke depan, arah kebijakan bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM akan ditempuh dalam periode tiga tahun mendatang melalui fokus proiritas sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat. Menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi.

2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM  
Fokus prioritas pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM diarahkan untuk mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara
3. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM, fokus prioritas peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi, dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang bersisten.

**b. Pengembangan Bidang Penanaman Modal**

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Lamandau tahun 2009 sampai 2013 yaitu :

1. Meningkatkan kuantitas kerjasama investasi swasta di berbagai sektor ekonomi. Fokus prioritas investasi swasta yang banyak menyerap tenaga kerja serta yang mampu memberikan peluang berkembangnya UMKM.
2. Meningkatkan iklim investasi. Fokus prioritas pembenahan infrastruktur.
3. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang investasi daerah.

### **c. Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Lamandau tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi perdesaan
3. Meningkatkan partisipasi aparatur dalam membangun desa
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Meningkatkan peran perempuan di perdesaan

### **4. Aspek Peningkatan Kesejahteraan, Pemertaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat dua penilain produk domestik regional bruto yang dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis merubahnya tahun dasar yang digunakan. Kondisi perekonomian Kabupaten Lamandau terlihat dari gambaran PDRB atas dasar harga konstan tahun 2009 - 2013. Rata-rata pertumbuhan PDRB yang terjadi pada kurun waktu tersebut sebesar 5,87%, tahun 2013 pertumbuhan PDRB 6,17 %. Adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan regional perkapita selama kurun waktu yang sama yaitu Rp. 8.440.479, pada tahun 2009, tahun 2013 menjadi Rp. 9.345.428 ( laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013).

Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lamandau tersebut, di samping memberikan dampak positif terhadap kenaikan tingkat pendapatan juga berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja baru bagi penduduk, walaupun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum sepenuhnya dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan peraturan daerah tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 11 tahun 2012, bahwa nomenklatur PMD adalah “Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa” berkedudukan di tingkat Kabupaten Lamandau, merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai eselonering II/b. Dalam menjalankan tugas pokoknya BPMD mempunyai fungsi yaitu:

- (a) Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (c) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (d) Penyelenggaraan pelayanan umum serta pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat desa.
- (e) Pembinaan teknis pemberdayaan aparatur dan hubungan aparatur pemerintah.

(f) Penyelenggaraan tugas yang diberikan Bupati.

(g) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut BPMD Kabupaten Lamandau bekerja menganut prinsip partisipatif, pendekatan kelompok (*group work*) atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sesuai dengan budaya setempat dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan bukannya menciptakan ketergantungan (*capacity building*). BPMD selaku Instansi pemerintah daerah berperan selaku koordinator dan fasilitator setiap program dan kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat di desa. Sedangkan masyarakat berperan tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan/pemberdayaan saja, tetapi adalah juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan/pemberdayaan dirinya sendiri melalui kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Keadaan personalia Badan PMD Kabupaten Lamandau adalah 20 orang. Berdasarkan Tingkat Pendidikan S2 sejumlah 3 orang, S1 = 7 orang, D3 = 2 orang dan SLTA = 7 dan SMP = 1 orang. Seiring dengan banyaknya perubahan di berbagai sektor pemerintahan maka program pemberdayaan masyarakat desa yang ditangani/dikelola dan menjadi kewenangan Badan PMD-pun mulai banyak mengalami perubahan serta sedikit demi sedikit berpindah kewenangan ke instansi lain dan berubah nomenklatur serta mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya makna dari program pemberdayaannya pun mulai hilang yaitu kurang memperhatikan peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang menjadi ciri dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

## B. Karakteristik Responden.

Untuk menggambarkan mengenai keadaan responden, maka penulis sajikan karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan dan usia dari unsur terkait sebagaimana terlihat dalam tabel di berikut ini

Tabel : 4.1 Keadaan Responden Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Lembaga Desa			F	%
		Tokoh Masyarakat	BPD	LPM		
1	SD	5	-	-	5	5,3
2	SLTP	16	2	4	22	23,4
3	SLTA	10	28	26	62	66,0
4	D3	-	2	1	3	3,2
5	S1	-	-	-	2	2,1
Jumlah		31	32	31	94	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014

Dari sejumlah sampel yang diteliti, ternyata pengurus lembaga desa berpendidikan SD 5 orang ( 5,3 %), SLTP 22 orang (23,4 %), SLTA 62 orang (66,0 %), Perguruan tinggi terdiri dari D- 3 3 orang dan S-1 2 orang (2,1 %). Dengan komposisi tingkat pendidikan seperti ini, hal ini terkait dengan kemampuan daya serap dan daya adaptasi para pengurus kelembagaan desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Namun tingkat pendidikan akan banyak ditunjang oleh pengalaman yang telah digeluti sebelumnya. Bagaimana mengenai keadaan usia responden, hal ini terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 4.2. Keadaan Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Lembaga Desa			F	%
		Tokoh Masyarakat	BPD	LPM		
1	20 – 29	-	12	6	18	19,1
2	30 – 39	-	13	21	34	36,2
3	40 – 49	11	7	4	22	23,4
4	50 – 59	17	-	-	17	18,1
5	60 keatas	3	-	-	3	3,2
Jumlah		31	32	31	94	100

Sumber : Hasil Penelitian diolah, 2014

Melihat tabel di atas sebagian besar responden yang berusia 30-39 (36,2 %), disusul yang berusia 40-49 (23,4 %), yang paling sedikit yang berusia 60 ke-atas (3,2 %). Hal ini menunjukkan bahwa para pengurus lembaga desa sebagian besar relatif yang sudah berusia dewasa. Terkait dengan usia ini umumnya mereka berada pada masa produktif.

Tabel : 4.3 Keadaan Responden Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Pekerjaan	Lembaga Desa			F	%
		Tokoh Masyarakat	BPD	LPM		
1	Petani / buruh tanih	24	5	3	32	34,0
2	Guru	-	10	-	10	10,6
3	Pamong Desa	7	-	-	7	7,4
4	Wiraswasta	-	17	28	45	48,0
Jumlah		31	32	31	94	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2014



Dari tabel di atas, memperlihatkan sebagian besar responden bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan petani, disusul guru dan yang lainnya. Kondisi mata pencaharian di desa sampel menunjukkan juga kecenderungan bahwa masyarakat desa di Kabupaten Lamandau masih didominasi mereka yang bekerja sebagai wirawasta dan petani. Hal ini didukung oleh keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak di bidang Perkebunan dan pertambangan, sehingga banyak merekrut tenaga kerja ke desa - desa sekitarnya. Sedangkan para petani dilibatkan, hal ini sejalan dengan banyaknya kegiatan pembangunan desa yang berorientasi pada sektor pertanian. Jenis mata pencaharian ini tentu akan memiliki keterkaitan dengan pola hidup dan pola kerja dalam membangun desa.

### **C. Uji Validitas dan Reliabilitas**

#### **1. Variabel Komunikasi**

Analisis validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment*. Pengujian validitas dilakukan pada 94 responden. Adapun hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel komunikasi dengan dimensi komunikator, pesan, media, komunikan dan umpan balik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Tabel rekapitulasi hasil pengujian validitas dari variabel komunikasi

Dimensi	Pertanyaan	nilai r	r hitung (5%)	r hitung (1%)	Keterangan
Komunikasi	1	0,597	0,202	0,236	Valid
	2	0,621	0,202	0,236	Valid
	3	0,517	0,202	0,236	Valid
	4	0,422	0,202	0,236	Valid
Pesan	5	0,332	0,202	0,236	Valid
	6	0,656	0,202	0,236	Valid
	7	0,643	0,202	0,236	Valid
Media	8	0,547	0,202	0,236	Valid
	9	0,481	0,202	0,236	Valid
	10	0,367	0,202	0,236	Valid
	11	0,339	0,202	0,236	Valid
	12	0,449	0,202	0,236	Valid
Komunikasikan	13	0,623	0,202	0,236	Valid
	14	0,478	0,202	0,236	Valid
	15	0,477	0,202	0,236	Valid
	16	0,611	0,202	0,236	Valid
Umpan Balik	17	0,620	0,202	0,236	Valid
	18	0,461	0,202	0,236	Valid
	19	0,388	0,202	0,236	Valid
	20	0,653	0,202	0,236	Valid

sumber : data penelitian diolah, 2014 (lampiran )

Dari Tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas diperoleh r hitung pada setiap item pertanyaan pada variabel komunikasi yaitu dimensi komunikasikan, pesan, media, komunikator dan umpan balik lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,202 untuk taraf kesalahan 5% dan 0,263 untuk taraf kesalahan 1%, sehingga dapat dikatakan tiap item pertanyaan dalam variabel penelitian adalah valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan, maka dilakukan uji reliabilitas. Pengujian dilakukan dengan metode *alpha cronbach* hasil pengujian reliabilitas variabel komunikasi dengan dimensi komunikasikan, pesan, media, komunikasikan dan umpan balik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Tabel rekapitulasi hasil pengujian realibilitas dari variabel komunikasi

Dimensi	$\alpha =$ ( <i>alpha Cronbach</i> )	r tabel (5%)	r tabel (1%)	Keterangan
<b>Komunikasi</b>	0,206	202	0,263	Reliabel
<b>Pesan</b>	0,290	202	0,263	Reliabel
<b>Media</b>	0,233	202	0,263	Reliabel
<b>Komunikan</b>	0,212	202	0,263	Reliabel
<b>Umpan Balik</b>	0,357	202	0,263	Reliabel

Sumber: Data Penelitian diolah, 2014 (Lampiran)

Dari tabel diketahui hasil perhitungan reliabilitas diperoleh nilai *alpha cronbach* pada variabel komunikasi yang terdiri dari dimensi komunikator, pesan, media, komunikan dan umpan balik lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,202 untuk taraf kesalahan 5% dan 0,263 untuk taraf kesalahan 1%, sehingga dapat dikatakan pertanyaan yang tergabung dalam variabel komunikasi adalah reliabel untuk dijadikan instrumen dalam penelitian.

## 2. Variabel Pemerdayaan Masyarakat

Pengujian Validitas untuk variabel pemberdayaan masyarakat dengan dimensi sosial, politis, ekonomi dan psikologis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tabel rekapitulasi hasil pengujian validitas dari variabel Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi	Pertanyaan	nilai r	r hitung (5%)	r hitung (1%)	Keterangan
Sosial	21	0,552	0,202	0,236	Valid
	22	0,403	0,202	0,236	Valid
	23	0,396	0,202	0,236	Valid
	24	0,341	0,202	0,236	Valid
	25	0,203	0,202	0,236	Valid
Politik	26	0,465	0,202	0,236	Valid
	27	0,503	0,202	0,236	Valid
	28	0,620	0,202	0,236	Valid
	29	0,478	0,202	0,236	Valid
Ekonomis	30	0,230	0,202	0,236	Valid
	31	0,624	0,202	0,236	Valid
	32	0,456	0,202	0,236	Valid
	33	0,489	0,202	0,236	Valid
Psikologis	34	0,324	0,202	0,236	Valid
	35	0,497	0,202	0,236	Valid
	36	0,331	0,202	0,236	Valid
	37	0,442	0,202	0,236	Valid
	38	0,356	0,202	0,236	Valid

Sumber : Data penelitian diolah, 2014 (lampiran )

Dari Tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas diperoleh r hitung pada setiap item pertanyaan pada variabel pemberdayaan masyarakat yaitu dimensi sosial, politik, ekonomis dan psikologis lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,202 untuk taraf kesalahan 5% dan 0,263 untuk taraf kesalahan 1%, sehingga dapat dikatakan tiap item pertanyaan dalam variabel penelitian adalah valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan, maka dilakukan uji reliabilitas. Pengujian dilakukan dengan metode *alpha cronbach* hasil pengujian reliabilitas variabel pemberdayaan masyarakat dengan dimensi sosial, politik ekonomis dan psikologis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Tabel rekapitulasi hasil pengujian realibilitas dari variabel Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi	$\alpha =$ ( <i>alpha Cronbach</i> )	r tabel (5%)	r tabel (1%)	Keterangan
Sosial	0,234	202	0,263	Reliabel
Politis	0,592	202	0,263	Reliabel
Ekonomis	0,413	202	0,263	Reliabel
Psikologis	0,456	202	0,263	Reliabel

Sumber ; Data penelitian diolah, 2014 (Lampiran )

Dari tabel diketahui hasil perhitungan reliabilitas diperoleh nilai *alpha cronbach* pada variabel pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari dimensi sosial, politis, ekonomis dan psikologis lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,202 untuk taraf kesalahan 5% dan 0,263 untuk taraf kesalahan 1%, sehingga dapat dikatakan pertanyaan yang tergabung dalam variabel pemberdayaan masyarakat adalah reliabel untuk dijadikan instrumen dalam penelitian.

#### D. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.

Hasil penelitian, dituangkan dalam dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik kuantitatif. Analisis deskriptif berusaha menyajikan gambaran menyeluruh sesuai dengan objek penelitian dan teori yang dijadikan rujukan untuk diuji melalui data empiris yang diperoleh atas dasar hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Pendeskripsian dan analisis variabel didasarkan pada akumulasi berbagai indikator dan dimensi yang diukur, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan analisis data primer maupun sekunder. Pengukuran atas variabel-variabel penelitian ditentukan berdasarkan penilaian sikap, persepsi atau pandangan responden terhadap setiap item pertanyaan

yang diajukan kemudian data diolah dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya jawaban setiap indikator terakumulasi dalam dimensi dan akumulasi dimensi tersebut merupakan kategori sikap responden terhadap suatu variabel.

### **1. Variabel Komunikasi**

Faktor komunikasi memegang peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama dalam menciptakan iklim perubahan yang kondusif. Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai sumber penyampaian pesan harus benar-benar tanggap terhadap informasi dan setiap kebijakan pembangunan dan mampu menterjemahkannya ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang tepat, dapat memilih saluran media yang cocok serta menyediakan umpan balik untuk mengetahui respon masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mampu menumbuhkan berbagai perubahan nilai dan sikap yang positif, adanya persepsi yang sama dan terjalinnya hubungan yang harmonis dengan pihak atau lembaga lain yang terkait. Untuk mengungkap hasil penelitian dari sub variabel komunikasi, dengan dimensi komunikator, pesan, media, komunikan dan umpan balik disajikan dalam bentuk tabel data.

## Penyajian data

### a. Komunikator

Tabel 4.8. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi Komunikator  
(n = 94)

No	Pertanyaan	Bobot jawaban					Tota l	
		1	2	3	4	5		
1	Kepala desa selama ini karena kesibukannya, sehingga tidak semua pesan/informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	f	0	14	28	52	0	94
		%	0	14,9	29,8	55,3	0	100
2	Dengan banyaknya tuntutan atau keluhan masyarakat, selama ini kepala desa nampaknya kurang begitu respon dalam mengatasi masalah tersebut.	f	0	36	50	3	6	94
		%	0	38,3	53,2	3,2	5,3	100
3	Dalam menarik simpati masyarakat untuk melakukan perubahan, apakah kepala desa senantiasa ikut terjun langsung dalam menghadapi hal masalah yang dihadapi selama ini	f	0	1	16	45	32	94
		%	0	1,1	17	47,9	34	100
4	Dalam memecahkan masalah pembangunan desa, apakah Kepala desa suka mempertemukan antara masyarakat dengan pejabat yang berwenang. ?	f	0	1	3	16	74	94
		%	0	1,1	3,2	17	78,7	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 55,3 responden memberi nilai 4 pada pernyataan bahwa karena kesibukannya sehingga tidak semua pesan/informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat oleh kepala desanya, 53,2% responden memberi nilai 3 atas pernyataan dengan banyaknya tuntutan atau keluhan masyarakat, selama ini kepala desa nampaknya kurang begitu respon dalam mengatasi masalah tersebut. 47,9 % responden memberi nilai 4 atas pernyataan dalam menarik simpati masyarakat untuk melakukan perubahan, apakah kepala desa senantiasa ikut terjun langsung dalam menghadapi masalah yang dihadapi selama ini dan 78,7 % responden memberi nilai 5 atas pernyataan dalam memecahkan masalah pembangunan desa, apakah Kepala desa suka mempertemukan antara masyarakat dengan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap empat pertanyaan dari dimensi komunikator dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.9. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi komunikator

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	0	0	0	tinggi
2	52	13,8	104	
3	97	25,8	291	
4	116	30,9	464	
5	111	29,5	555	
Total	376	100	1.414	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 4 \times 94$	376
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 4 \times 94$	1.880
Range	$1.880 - 376$	1.504
Jenjang Range	$1.504 : 5$	301

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
376	677	978	1279	1.414
			1580	1881

Sumber : Hasil olah data, 2014.

Ditinjau dari dimensi komunikator yang menyangkut dalam penyampaian pesan, daya tanggap, kemampuan menyampaikan pesan secara jelas terhadap pesan-pesan pembangunan, daya empati dan sebagai katalisator, dari data yang diolah cukup mendapat tanggapan yang positif dengan total skor 1.414 yang berarti cukup tinggi. Dari data tersebut menunjukkan, bahwa kemampuan komunikasi pimpinan sudah cukup baik, hal ini menurut pernyataan sejumlah responden, yaitu "Karena Kepala Desa berkepentingan dalam melancarkan roda pemerintah dan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan yang telah digariskan dari tingkat atasnya yang senantiasa melibatkan setiap unsur dalam masyarakat". Dari uraian di atas, yang jelas bahwa kemampuan daya tanggap Kepala Desa dalam



menerima dan menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat melalui media tertentu senantiasa diupayakan dan masyarakat pada umumnya mengetahui sebagian dari informasi pembangunan yang tengah terjadi. Namun belum menjamin dapat merubah sikap dan tindakan masyarakat ke arah positif, jika tidak dibarengi dengan sikap empathy dari kepala desa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, terutama untuk turut merasakan dan terjun mengatasi masalah yang dihadapi warga. Sebab dengan sikap empathy tersebut menurut Onong U. Effendi (1981 : 129) dalam Entang (2007), “Akan menimbulkan simpati, karena ia dapat memahami *frame of reference* masyarakat, mengetahui waktu, situasi dan kondisi yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan dan dapat memilih saluran media yang cocok serta mau mendengar keluhan dari masyarakatnya”.

#### b. Dimensi Pesan

Tabel 4.10. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi pesan (n = 94)

No	Pertanyaan		Bobot jawaban					Total
			1	2	3	4	5	
5	Dalam penyampaian informasi atau pesan-pesan pembangunan yang disampaikan Kepala Desa, jarang menimbulkan berbagai kesalah pahaman ? Apakah itu dirasakan Bapak/Ibu	f	2	38	54	0	0	94
		%	2,2	40,4	57,4	0	0	100
6	Dalam penyampaian pesan –pesan pembangunan melalui berbagai forum pertemuan, bisanya Kepala desa dalam penyampaian senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat	f	0	16	4	18	56	94
		%	0	17	4,3	19,1	59,6	100
7	Setiap pesan-pesan pembangunan / kebijakan yang baru selama ini masyarakat belum merasakan manfaatnya	f	2	13	55	24	0	94
		%	2,2	13,8	58,5	25,5	0	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 57,4% responden memberi nilai 3 pada pernyataan bahwa dalam penyampaian informasi atau pesan-pesan pembangunan yang disampaikan Kepala Desa, jarang menimbulkan berbagai

kesalahpahaman, 59,6% responden memberi nilai 5 atas pernyataan dalam penyampaian pesan –pesan pembangunan melalui berbagai forum pertemuan, biasanya Kepala desa dalam penyampaiannya senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan 58,5 % responden memberi nilai 3 pernyataan setiap pesan-pesan pembangunan / kebijakan yang baru selama ini masyarakat belum merasakan manfaatnya.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap empat pertanyaan dari dimensi pesan dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.11. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Pesan

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	4	1,4	4	cukup
2	67	23,8	134	
3	113	40,1	339	
4	42	15	168	
5	56	19,9	280	
Total	282	100	925	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 3 \times 94$	282
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 3 \times 94$	1.410
Range	$1.410 - 282$	1.128
Jenjang Range	$1.128 : 5$	226

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
282	508	734	925	960
				1.186
				1.412

Sumber : Hasil olah data, 2014.

Dari hasil olah data menunjukkan, bahwa dari sisi penyampaian pesan menunjukkan kategori cukup yaitu jumlah skor 925, diperoleh gambaran bahwa masih banyak ditemui mengenai kesulitan yang dihadapi Kepala Desa dalam penyampaian pesan, selain karena kondisi masyarakat yang sangat beragam dari segi kepentingan, waktu dan lokasi yang jauh, juga

kesibukan mengurus tugas-tugas sebagai Kepala Desa dan tugas-tugas lain di luar sebagai Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Karena di samping menjadi Kepala Desa, ada pekerjaan lain seperti sebagai pedagang, pengusaha, PNS dan sebagainya. Dengan demikian memang diakui, bahwa sebagian responden menyatakan masih banyak informasi penting yang kurang banyak diketahui, misalnya mengenai penanganan program – program PM2L (Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu), program bedah rumah, program-program kemitraan dengan perusahaan besar swasta dan program-program bantuan lainnya dari pemerintah. Hal ini bisa menimbulkan suasana kurang kondusif terutama pada peran lembaga desa lain sebagai mitra kerja. Hal ini menurut sejumlah responden disebabkan Kepala Desa biasanya hanya menyampaikan pesan-pesan tertentu terbatas pada orang-orang tertentu saja. Adanya selektifitas dalam penyampaian informasi seperti ini, menurut penuturan pengurus lembaga desa tidak bisa dikatakan salah, karena tidak setiap informasi layak untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat, dengan pertimbangan bahwa kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan mengolah dan menterjemahkan setiap informasi masih sangat kurang, ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dari sebagian masyarakat masih sangat rendah namun jika ada hal-hal yang justru seharusnya diketahui kemudian tidak disebarkan, hal ini bisa menimbulkan prasangka dan hubungan yang kurang harmonis.

## c. Dimensi Media

Tabel 4.12. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi Media (n = 94)

No	Pertanyaan		Bobot jawaban					Total
			1	2	3	4	5	
8	Dalam mengadakan pendekatan kepada masyarakat oleh Kepala Desa, apakah sering dilakukan secara informal (melalui anjang sana atau mengajak bicara secara pribadi, misalnya) ?	f	0	1	3	42	46	94
		%	0	1,1	3,2	44,7	48,9	100
9	Menurut Bapak/Ibu apakah forum pertemuan (seperti pengajian, kebaktian rumah tangga) ,apakah digunakan dalam menyampaikan pesan oleh Kades, apakag bapak/ibu setuju	f	0	1	5	43	45	94
		%	0	1,1	5,3	45,7	47,9	100
10	Forum pertemuan dengan para tokoh masyarakat , apakah sering dilakukan oleh kepala desa ?, dan apakah bapak/ibu setuju	f	0	1	5	82	6	94
		%	0	1,1	5,3	87,2	6,4	100
11	Dalam melakukan hubungan kerja keluar, apakah memanfaatkan jaringan hubungan kerja melalui forum-forum lain (paguyuban,asosiasi) ?	f	0	15	75	4	0	94
		%	0	16	79,8	4,3	0	100
12	Selain pesan atau informasi pembangunan yang diterima dari para pejabat yang berwenang, apakah Bapak/Ibu sering memanfaatkan dari sumber media massa (TV, Radio) ?	f	1	53	35	4	1	94
		%	1,1	56,4	37,2	4,3	1,1	100

Sumber : Hasil Penelitian diolah, 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 48,9% responden memberi nilai 5 pada pernyataan bahwa dalam mengadakan pendekatan kepada masyarakat oleh Kepala Desa, apakah suka dilakukan secara informal (melalui anjang sana atau mengajak bicara secara pribadi, misalnya), 47,9% responden memberi nilai 5 atas pernyataan menurut Bapak/Ibu apakah forum pertemuan (seperti pengajian, kebaktian rumah tangga), apakah digunakan dalam menyampaikan pesan oleh Kepala Desa, 87,2 % responden memberi nilai 4 pada pernyataan forum pertemuan dengan para tokoh masyarakat, apakah sering dilakukan oleh kepala desa. 79,8% responden memberi nilai 3 pada pernyataan dalam melakukan hubungan kerja keluar, apakah memanfaatkan jaringan hubungan kerja melalui forum-forum lain (paguyuban,asosiasi) dan 56,4 % responden memberi nilai 2 pada pernyataan

selain pesan atau informasi pembangunan yang diterima dari para pejabat yang berwenang, apakah Bapak/Ibu sering memanfaatkan dari sumber media massa (TV, Radio) .

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap lima pertanyaan dari dimensi media dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.13. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Media

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	1	0,2	1	tinggi
2	71	15,1	142	
3	126	26,8	378	
4	174	32,2	696	
5	98	20,9	490	
Total	470	100	1.707	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 5 \times 94$	470
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 5 \times 94$	2.350
Range	$2.350 - 470$	1.880
Jenjang Range	$1.880 : 5$	376

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
470	846	1222	1598	1.707
				1.974
				2.350

Sumber : Hasil olah data, 2014.

Jika diamati hasil penelitian di lapangan, mengenai kemampuan Kepala Desa dalam menggunakan media dalam berhubungan dengan masyarakat terutama tokoh masyarakat/ulama yang ada di desa, dari pernyataan nomor 8 sampai dengan nomor 12 diperoleh skor 1.707 yang berarti dapat dikategorikan nilai tinggi. Data tersebut menunjukkan betapa Kepala Desa dalam merangkul masyarakat desa, melalui media dalam bentuk forum pertemuan, saluran interpersonal tidak begitu menghadapi kesulitan. Ini sejalan dengan yang

diungkapkan oleh Roger dalam Prastiyanti (2012), bahwa keberhasilan komunikasi saluran interpersonal interaktif dalam merangkul masyarakat lewat forum-forum pertemuan sangat efektif. Keberhasilan komunikasi interaktif sebagai sarana sosialisasi program pembangunan masyarakat desa ini menurut Rogers dalam Prastiyanti (2012) dikarenakan memiliki kelebihan tidak menggunakan saluran formal, karena masyarakat pedesaan yang secara sosiologis masih tergolong sebagai *primary society*, yang masih awam dengan saluran-saluran formal. Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komunikasi yang efektif diperlukan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat agar pesan-pesan atau program-program pembangunan dapat diterapkan dan diterima lingkungannya, dalam memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Walaupun masyarakat belum begitu memaknai tentang cara yang dilakukan oleh Kepala Desanya. Tendensi ini nampak dalam upaya mengajak masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada masih bersifat parsial belum terintegrasi, baik secara fungsional maupun struktural. Contoh konkrit misalnya, dalam upaya menggalakkan swadaya masyarakat, penggalakan kegiatan bulan bakti gotong royong yang juga merupakan program kabupaten, masyarakat masih menjadi penonton tidak mau ikut dalam suasana gotong royong dengan perangkat – perangkat desa, penyelenggaraan sosialisasi- sosialisasi yang dilaksanakan oleh pustu seperti Pos yandu masih minim ibu-ibu yang ikut serta, Pembinaan generasi muda dan sebagainya. Hal inipun bisa terjadi disebabkan oleh sebagian besar penduduk atau masyarakat yang bekerja sebagai tenaga harian lepas di perusahaan besar

swasta seperti di perkebunan kelapa sawit, sehingga waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bersifat gotong royong semakin menurun. Menurut penuturan dari para pengurus lembaga desa biasanya bila terjadi kebuntuan informasi, karena belum optimalnya intensitas dalam pemanfaatan media yang digunakan karena kendala di lapangan.

#### d. Dimensi Komunikasi

Tabel 4.14. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai Dimensi Komunikasi (n = 94)

No	Pertanyaan	Bobot jawaban					Total	
		1	2	3	4	5		
1	Dalam menerima setiap perubahan kebijakan, bagaimana respon kemampuan lembaga desa dalam menanggapi terhadap perubahan tersebut, selalu ditindaklanjuti	f	2	5	20	55	12	94
		%	2,1	5,3	21,3	58,5	12,8	100
2	Selama ini perubahan - perubahan yang terjadi di lembaga - lembaga desa nampaknya sangat lambat. Setujukah dengan hal tersebut	f	1	1	14	47	31	94
		%	1,1	1,1	14,9	50	33	100
3	Apakah hubungan yang dilakukan Kepala Desa dengan organisasi/lembaga sosial lain yang selevel (BPD, LPM, PKK, LSM) nampak banyak menemui kesulitan	f	13	34	40	6	1	94
		%	13,8	36,2	42,6	6,4	1,1	100
4	Dengan keadaan desa yang tersebar ke berbagai pelosok, apakah hubungan kerja dengan pemerintah tingkat atasnya banyak menghadapi hambatan (kesulitan)	f	4	6	66	14	4	94
		%	4,3	6,4	70,2	14,9	4,3	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 58,5 % responden memberi nilai 4 pada pernyataan dalam menerima setiap perubahan kebijakan, bagaimana kemampuan lembaga desa dalam menanggapi terhadap perubahan tersebut, selalu ditindaklanjuti, 50,0% responden memberi nilai 4 atas pernyataan selama ini perubahan - perubahan yang terjadi di lembaga - lembaga desa nampaknya sangat lambat. 42,6 % responden memberi nilai 3 atas

pernyataan apakah hubungan yang dilakukan Kepala Desa dengan organisasi/lembaga sosial lain yang selevel (BPD,LPM, PKK, LSM) nampak banyak menemui kesulitan dan 70,2 % responden memberi nilai 3 atas pernyataan dengan keadaan desa yang tersebar ke berbagai pelosok, apakah hubungan kerja dengan pemerintah tingkat atasnya banyak menghadapi hambatan (kesulitan).

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap empat pertanyaan dari dimensi komunikasi dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.15. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi komunikasi

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	20	5,3	20	cukup
2	46	12,2	92	
3	140	37,2	420	
4	122	32,4	488	
5	48	12,8	240	
Total	376	100	1260	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 4 \times 94$	376
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 4 \times 94$	1.880
Range	$1880 - 376$	1.504
Jenjang Range	$1504 : 5$	301

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
376	677	978	1260	1279
				1580
				1881

Dari perhitungan hasil olah data jumlah skor yang diperoleh dari dimensi komunikasi, menunjukkan persentase yang dinilai cukup. Tinggi rendahnya pemahaman masyarakat akan pesan-pesan yang disampaikan dapat dilihat dari daya respon, sikap kemampuan dan jalinan hubungan yang dibina. Dari daya respon masyarakat tentu sangat tergantung dari banyak faktor diantaranya, nilai mamfaat stimulan, pengakuan, pemahaman dan kesadaran



masyarakat terhadap informasi yang diterima. Pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat desa pasif, apatis tidak selamanya benar, justru dewasa ini dengan adanya perubahan konstelasi politik pada level atas, memiliki implikasi pada masyarakat tingkat desa. Menurut penuturan dari pejabat kecamatan bahwa “Masyarakat desa kini sudah semakin kritis, bahkan mampu mengekspresikan diri dalam bentuk unjuk rasa melalui cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak penguasa, cara mereka lebih merupakan bentuk latah (peniruan) cara-cara yang mereka lihat dari mass media, walaupun kadang tidak jelas arah sasarannya”. Dari ilustrasi tersebut, mengisyaratkan bahwa masyarakat desa melalui lembaga yang ada sebenarnya mulai menyadari hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai masyarakat untuk kemajuan di desanya. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap perubahan peran, fungsi dan misi kelembagaan desa sebenarnya belum banyak dihayati oleh aparat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah perubahan yang substansial. Adanya perubahan pada struktur organisasi, prosedur teknis yang diberlakukan dalam era otonomi ini, belum berimplikasi pada perubahan nilai dan orientasi lainnya. Adanya sikap apatisme dan pasif terhadap program yang dibangun oleh lembaga desa biasanya disebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Kepala Desa yang dipandang tidak sesuai dengan harapan serta adanya kelompok oposisi dari simpatisan Kepala Desa yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa sebelumnya. Selanjutnya dalam konteks peranan Kepala Desa sebagai

penghubung (linker) dengan sumber-sumber yang diperlukan, yaitu menyangkut hubungan dengan lembaga-lembaga desa lain secara horizontal dan pihak-pihak supra desa secara vertikal dalam soal pembangunan desa, kendatipun hal ini dilakukan tapi belum optimal. Sebenarnya membangun hubungan antar lembaga desa amat penting mengingat dalam era desentralisasi, seorang Kepala Desa sebagai pemimpin tidak lagi menjadi penguasa tunggal, tapi dalam setiap tindakan harus mampu berkolaborasi dengan lembaga desa lainnya sebagai mitra dan lembaga supra sebagai pembina. Dari hasil olah data mengenai hubungan kerja dengan lembaga pembina menunjukkan tingkat kategori sedang. Hal ini bermakna kendatipun upaya-upaya untuk melakukan hubungan kerja itu ada, namun cenderung lebih merupakan kegiatan rutin belum terstruktur yang mengarah pada upaya perubahan signifikan terhadap keberdayaan masyarakat yang mampu secara kreatif dan mandiri. Untuk mengungkap umpan balik, yakni bagaimana sikap masyarakat terhadap berbagai pesan yang disampaikan, perlu diketahui umpan balik yang dapat menimbulkan dampak dan perubahan tingkah laku serta dukungan masyarakat. Dari hasil olah deskriptif diperoleh keterangan sebagian responden memberi tanggapan yang positif.

### e. Dimensi Umpan Balik

Tabel 4.16. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi Umpan Balik (n = 94)

No	Pertanyaan		Bobot jawaban					Total
			1	2	3	4	5	
1	Bagaimana dukungan lingkungan masyarakat terhadap langka-langka yang dilakukan lembaga-lembaga desa yang ada, apakah selalu memberi dukungan	f	0	1	12	48	33	94
		%	0	1,1	12,8	51,1	35,1	100
2	Dalam memecahkan persoalan pembangunan di desa, menurut pengalaman apakah ada suasana dialogis (saling bertukar pikiran) antara Kepala Desa dengan semua elemen lembaga yang ada termasuk tokoh-tokoh masyarakat desa	f	0	1	5	56	32	94
		%	0	1,1	5,3	59,6	34	100
3	Dalam acara penyampaian informasi atau laporan pertanggung jawaban, sudah tercermin adanya suasana keterbukaan/saling pengertian ?	f	2	3	82	5	2	94
		%	2,1	3,2	87,2	5,3	2,1	100
4	Dari hasil musyawarah yang telah disepakati, bagaimana tindak lanjut dari setiap permasalahan yang dihadapi, apakah sering ditindaklanjuti	f	1	11	10	70	2	94
		%	1,1	1,7	10,6	74,5	2,1	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 51,1 % memberi nilai 4 pada pernyataan bagaimana dukungan lingkungan masyarakat terhadap langka-langka yang dilakukan lembaga-lembaga desa yang ada, apakah selalu memberi dukungan, 59,6 % memberi nilai 4 atas pernyataan dalam memecahkan persoalan pembangunan di desa, menurut pengalaman apakah ada suasana dialogis (saling bertukar pikiran) antara Kepala Desa dengan semua elemen lembaga yang ada termasuk tokoh-tokoh masyarakat desa. 87,2 % responden memberi nilai 3 atas pernyataan dalam acara penyampaian informasi atau laporan pertanggung jawaban, sudah tercermin adanya suasana keterbukaan/saling pengertian dan 74,5 % responden memberi nilai 4 atas

pernyataan dari hasil musyawarah yang telah disepakati, bagaimana tindak lanjut dari setiap permasalahan yang dihadapi dengan keadaan desa, apakah sering ditindaklanjuti. Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap empat pertanyaan dari dimensi umpan balik dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.17. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi umpan Balik

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	3	0,7	3	tinggi
2	16	4,3	32	
3	109	29	327	
4	179	47,6	716	
5	69	18,5	345	
Total	376	100	1.423	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 4 \times 94$	376
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 4 \times 94$	1.880
Range	1.880 - 376	1.504
Jenjang Range	1504: 5	301

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
376	677	978	1279	1.423
				1580
				1881

Dari jawaban responden dengan jumlah skor 1.423 yang berarti tinggi. Data tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan para pengurus LPM, BPD yang menyebutkan: "Pada dasarnya masyarakat senantiasa mendukung terhadap upaya pembangunan untuk kemajuan desa, namun itu semua sangat tergantung bagaimana pihak pemerintah dalam menciptakan suasana dialogis, keterbukaan dan tindak lanjut dari apa yang telah diusulkan atau disepakati bersama". Suasana dialogis tercipta bila semua pihak memandang adanya rasa saling percaya untuk membangun rasa kebersamaan. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada umumnya sikap dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan desa masih cukup tinggi,

walaupun dukungan tersebut karena adanya mobilisasi dari aparat untuk ikut terjun membantu dalam pembangunan sarana dan prasana fisik. Dalam masyarakat masih ada pandangan bahwa urusan pembangunan merupakan urusan pemerintah. Persepsi semacam ini terpatri cukup lekat, akibat sentralisasi politik pembangunan oleh pemerintah sebelumnya (Orde Baru), bagaimanapun masyarakat di pedalaman masih tetap mendukung pola pemerintahan orde baru, demikian dominan, sehingga akses kehidupan lembaga desa menjadi amat terbatas. Persoalan seperti itu tentu bukan merupakan tanggung jawab pada pundak Kepala Desa semata, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkompeten terhadap “survivenya” lembaga desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam pembangunan desa, terutama tim Pembina Lembaga Desa oleh pemerintah supra desa.

Tabel 4.18. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai Variabel Komunikasi (n = 94)

No	Dimensi		Bobot jawaban					Total
			1	2	3	4	5	
1	Komunikator	f	0	52	97	116	111	376
		%	0	13,8	25,8	30,9	29,5	100
2	Pesan	f	4	67	113	42	56	282
		%	1,4	23,8	40,1	15	19,9	100
3	Media	f	1	71	126	174	98	470
		%	0,2	15,1	26,8	32,2	20,9	100
4	Komuniator	f	20	46	140	122	48	376
		%	5,3	12,2	37,2	32,4	12,8	100
5	Umpan Balik	f	3	16	109	179	69	376
		%	0,7	4,3	29	47,6	18,5	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2014.

Tabel 4.19. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Komunikasi

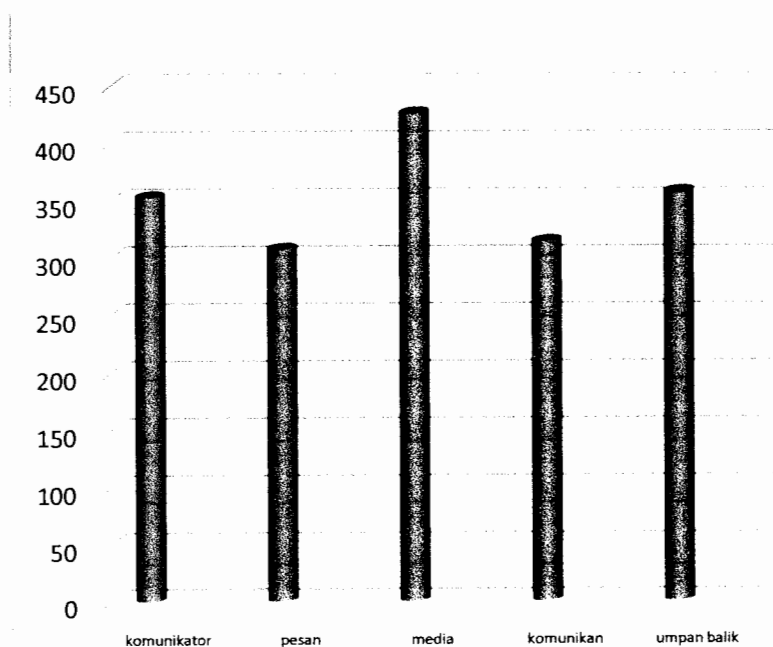
Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	28	1,5	28	tinggi
2	252	13,7	504	
3	585	31,8	1755	
4	593	32,2	2372	
5	382	20,8	1910	
Total	1840	100	6569	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 20 \times 94$	1880
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 20 \times 94$	9400
Range	$9400 - 1880$	7520
Jenjang Range	$7520 : 5$	1504

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
1.880	3.384	4.888	6.392	6.569
			7.896	9.400

Sumber : Hasil olah data, 2014

Grafik 4.1 frekuensi rata-rata variabel Komunikasi



Mengkaji tabel dan grafik di atas, memperoleh gambaran bahwa tanggapan responden dari sub variabel komunikasi menunjukkan hasil yang bervariasi dari hasil perolehan masing-masing dimensi, namun dari apa yang diungkapkan dari tabel tadi merupakan gambaran satu kesatuan yang saling berkaitan secara kumulatif. Menurut hasil pengolahan data, didapat skor total sebesar **6.569** yang berarti berada pada kategori tinggi atau baik. Dari data tersebut bermakna, bahwa kemampuan berkomunikasi Kepala Desa berdasarkan unsur-unsur komunikasi yang diuji dapat dikatakan cukup berhasil dengan segala variasinya, yang memberi kontribusi - kontribusi nilai paling tinggi adalah media yang digunakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di perdesaan, yang lebih mendominasi saluran interpersonal lewat forum – forum non formal. Media komunikasi yang dominan digunakan yaitu media komunikasi verbal, lewat bahasa lisan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh masyarakat yaitu bahasa daerah yang berlaku di Kabupaten Lamandau, juga lewat momen – momen yang lebih bersifat kekeluargaan dan kebiasaan –kebiasaan di masyarakat yang masih sifatnya mengikat atau membudaya.

## **2. Variabel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.**

Untuk menganalisis derajat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya, dalam penelitian ini dilihat dari 4 dimensi, yakni dimensi pemberdayaan sosial, politik, ekonomi dan psikologis (Friedmann, 1992 : 33; Kartasmita, 1996). Mendorong pemberdayaan masyarakat berarti memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat, memberi

peluang masyarakat untuk mengakses terhadap sumber-sumber dan pelayanan publik, memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan hasil olah data, diperoleh deskripsi sebagai berikut :

### Penyajian data

#### a. Sosial

Tabel 4.20. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi sosial (n = 94)

No	Pertanyaan	Bobot jawaban					Total	
		1	2	3	4	5		
1	Selama ini masyarakat masih merasa sulit memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka ikut mengontrol kinerja pemerintah desa	f	3	6	29	54	3	94
		%	3,2	6,4	30,9	57,4	3,2	100
2	Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini masyarakat mendapat kemudahan memperoleh layanan dari pemerintah sesuai dengan harapan	f	0	1	42	45	5	94
		%	0	1,1	21,3	57,9	5,3	100
3	Bila diperhatikan apakah bantuan yang diberikan pemerintah baik dana maupun teknis sudah mampu memancing swadaya masyarakat yang lebih besar	f	2	1	26	61	4	94
		%	2,1	1,1	27,7	64,9	4,3	100
4	Dengan adanya perubahan pengaturan/kebijakan tentang lembaga desa (Pemdes, LPM, BPD) tidak berdampak positif pada tatanan gotong royong masyarakat	f	2	10	79	1	2	94
		%	2,1	10,6	84	1,1	2,1	100
5	Menurut Bapak/Ibu, dengan perubahan kebijakan, apakah lembaga desa lebih memperlihatkan kemampuan kerjasama secara sinergis dengan lembaga supra desa (Kec/Pemda)	f	1	3	65	23	2	94
		%	1,1	3,2	69,1	24,5	2,1	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 57,4% responden memberi jawaban 4 pada pernyataan selama ini masyarakat masih merasa sulit memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka ikut mengontrol kinerja pemerintah desa, 57,9 % memberi jawaban 4 atas pernyataan menurut bapak/ibu, apakah selama ini masyarakat mendapat kemudahan memperoleh layanan dari pemerintah sesuai dengan harapan . 64,9 % responden memberi jawaban 4 atas pernyataan bila diperhatikan



apakah bantuan yang diberikan pemerintah baik dana maupun teknis sudah mampu memancing swadaya masyarakat yang lebih besar, 84 % responden memberi nilai 3 pada pernyataan dengan adanya perubahan pengaturan/kebijakan tentang lembaga desa (Tokoh Masyarakat, LPM, BPD) tidak berdampak positif pada tatanan gotong royong masyarakat dan 69,1% memberi nilai 3 pada pernyataan menurut bapak/ibu, dengan perubahan kebijakan, apakah lembaga desa lebih memperlihatkan kemampuan kerjasama secara sinergis dengan lembaga supra desa (Kecamatan /Pemda). Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap lima pertanyaan dari dimensi sosial dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.21. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Sosial

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	8	1,7	8	cukup
2	21	4,5	42	
3	241	51,3	723	
4	184	39,1	736	
5	16	3,4	80	
Total	470	100	1.586	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 5 \times 94$	470
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 5 \times 94$	2.350
Range	2.350 - 470	1.880
Jenjang Range	$1.880 : 5$	376

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
470	864	1.222	1.586	1.974
			1.598	2.350

Sumber : Hasil olah data, 2014.

Dari dimensi keberdayaan sosial yang diperlihatkan pada tabel mengisyatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam melakukan

berbagai kegiatan terutama keterlibatan baik secara individu maupun kelompok dalam proses pembangunan desa sudah cukup memadai. Hal ini bisa ditelusuri dari hasil penelitian dari beberapa indikator yakni dari akses masyarakat terhadap informasi, pelayanan, derajat keswadayaan, pemeliharaan nilai gotong royong dan kerjasama sinergis, ternyata responden memberi tanggapan cukup baik, dengan skor yang diperoleh **1.586** yang berarti cukup. Hal ini berarti bahwa secara sosiologis masyarakat desa memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dan pertukaran informasi antar anggota maupun komunitas organisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Lembaga desa sebagai pengejawantah dari wadah interaksi sosial tentu memberi sarana bagaimana masyarakat desa dapat mengaktualisasikan diri dalam ranah kehidupan sehingga terjadi simbiosis mutualistik. Hasil tabulasi data sebagaimana tersurat dalam tabel, menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi belum sepenuhnya kondusif. Padahal seperti diketahui, bahwa informasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial yang terbuka. Akses informasi akan bermamfaat manakala masyarakat membutuhkannya. Dari hasil wawancara ada kesan bahwa “Untuk beberapa informasi penting kadang-kadang ada pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan apabila informasi itu dipandang dapat memicu reaksi masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang sensitif. Contohnya tidak semua kalangan pengurus lembaga desa mengetahui bagaimana dana bantuan itu diterima dan digulirkan oleh Kepala Desa. Dan bagi masyarakat desa sendiri kadang-kadang tidak begitu mepedulikan

apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, selama tidak merugikan dan mengusik ketenteraman dan kepentingan mereka. Ini artinya dari aspek keberdayaan sosial kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses informasi terhadap sumber-sumber daya dan pelayanan masih dirasakan belum begitu nampak menjadi kebutuhan. Selanjutnya, mengenai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa, dari hasil tabulasi data, memperlihatkan bahwa keswadayaan masyarakat tersebut terkait dengan jenis/sifat program yang akan dikerjakan. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden diperoleh keterangan “Selama ini dirasakan masih ada pandangan keliru dari masyarakat, seolah-olah urusan pembangunan adalah urusan pemerintah. Jika ada bantuan atau pinjaman dari pemerintah dianggap sebagai pemberian hadiah (*charity*) yang dalam pengelolaanya kadang-kadang kurang terkontrol dengan baik”. Hal ini terungkap dari program-program pembangunan, terutama pembangunan sarana fisik seperti jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan biasanya mereka membantu sebatas tenaga. Itupun bila mereka bekerja biasanya mengharapkan imbalan (materi) walaupun tidak didasarkan pada perhitungan yang wajar. Melalui penelusuran wawancara diperoleh keterangan, bahwa relatif tingginya keswadayaan, umumnya lebih banyak pada program-program pembangunan yang bernuansa keagamaan, derajat keswadaanyaannya masih tergolong tinggi. Sedangkan untuk program-program yang sifatnya proyek, masyarakat desa umumnya menuntut imbalan seperlunya. Kemudian mengenai pemeliharaan nilai gotong royong, dapat dikatakan masyarakat masih memandang sebagai

sebuah keniscayaan dalam arti masih dianggap penting. Gotong royong dipelihara sebagai bagian dari proses kehidupan yang memberi mamfaat ketika sumber-sumber daya yang diperlukan semakin langka. Namun, seiring adanya perubahan dan dinamika kehidupan terdapat kecenderungan kesadaran gotong royong masyarakat desa dalam membangun mulai pudar. Dari tabulasi data berada pada kisaran rendah ke sedang. Kendati demikian, dari sisi kerjasama kelompok masih dikatakan cukup kental, mengingat kerjasama kelompok biasanya terfokus pada suatu pekerjaan, urusan tertentu serta adanya saling ketergantungan. Sebagai contoh ketika di desa akan diadakan perbaikan prasarana jalan, jembatan, ibadah, lomba kebersihan, perayaan biasanya masyarakat mengikuti dan aktif dalam kegiatan tersebut. Hanya keterlibatan dalam persoalan yang memerlukan pemikiran, perubahan sebagian besar masyarakat kurang merespon dengan baik . Oleh karena itu, pendekatan terhadap upaya pemberdayaan sosial , harus melibatkan tokoh masyarakat, lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat melalui pendekatan keagamaan atau religius. Melalui pendekatan religius, dipandang pendekatan yang lebih sesuai karena kultur dan sikap masyarakat desa di Kabupaten Lamandau yang religius dan paternalistik. Jadi bila tokoh masyarakat (Pendeta, Pastor, Uztad) mendukung terhadap suatu program/perubahan yang disampaikan pemerintah melalui lembaga desa, maka masyarakat akan lebih mudah menerima pula terhadap program /kebijakan tersebut.

## b. Dimensi Politik

Tabel 4.22. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi Politik (n = 94)

No	Pertanyaan		Bobot jawaban					Tota
			1	2	3	4	5	
26	Dari pengamatan Bapak/Ibu, para pengurus lembaga desa semakin mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat	f	1	2	39	51	1	94
		%	1,1	2,1	41,5	54,3	1,1	100
27	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah keberadaan lembaga desa dalam menjalankan fungsi & wewenangnya telah sesuai dengan apa yang diharapkan ?	f	1	5	77	8	3	94
		%	1,1	5,3	81,9	8,5	3,2	100
28	Peranserta aktif masyarakat untuk menjalankan program pembangunan desa melalui wadah kelembagaan desa yang ada, cukup aktif	f	1	5	9	50	29	94
		%	1,1	5,3	9,6	53,2	30,9	100
29	Selama ini , program bantuan pemerintah dalam pelaksanaannya kurang menyentuh kepada kelompok warga yang miskin.	f	0	1	2	46	45	94
		%	0	1,1	2,1	48,9	47,9	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 54,3 % memberi nilai 4 pada pernyataan bahwa dari pengamatan bapak/ibu, para pengurus lembaga desa semakin mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, 81,9 % memberi nilai 3 atas pernyataan menurut pendapat Bapak/Ibu apakah keberadaan lembaga desa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya telah sesuai dengan apa yang diharapkan ?. 53,2 % responden memberi nilai 4 pada pernyataan peranserta aktif masyarakat untuk menjalankan program pembangunan desa melalui wadah kelembagaan desa yang ada cukup aktif, dan 48,9% responden memberi nilai 4 pada pernyataan selama ini , program bantuan pemerintah dalam pelaksanaannya kurang menyentuh kepada kelompok warga yang miskin. Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat

tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap empat pertanyaan dari dimensi politis dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.23. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Politik

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	3	0.8	3	tinggi
2	13	3.5	26	
3	127	33.8	381	
4	155	41.2	620	
5	78	20.7	390	
Total	376	100	1420	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 4 \times 94$	376
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 4 \times 94$	1.880
Range	$1.880 - 376$	1.504
Jenjang Range	$1.504 : 5$	301

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
376	677	978	1279	1420
			1.580	1.881

Sumber : Hasil olah data, 2014.

Pemberdayaan masyarakat desa dari dimensi politik, yakni bagaimana para pengurus lembaga desa mampu dengan wewenang yang diberikan mampu melakukan *bargaining*, memanfaatkan wewenang dan dukungan terhadap program dan pemihakan pada masyarakat. Berdasarkan hasil tabulasi data menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan politik masyarakat berada pada kategori tinggi dengan skor 1.420. Dengan melihat data di atas, bahwa kondisi keberdayaan politik masyarakat dalam penyusunan dan implementasi program melalui lembaga desa yang diwakili oleh para pemimpin lembaga belum sepenuhnya mampu melakukan *bargaining power* dengan para pengambil keputusan (*decision maker*) lembaga supra

desa, memanfaatkan wewenang dan pemihakan dalam menggoalkan kepentingan masyarakat. Kemudian mengenai seberapa besar lembaga desa mampu memanfaatkan wewenang yang ada, apakah sudah benar-benar dijalankan dengan optimal, berdasarkan hasil olah data memperlihatkan, masyarakat umumnya memberi tanggapan sangat variatif namun cenderung cukup positif. Adanya perubahan peran dan fungsi kelembagaan desa yang baru belum menunjukkan perubahan kinerja dari lembaga desa terutama menyangkut keberdayaan politik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pejabat kecamatan : “Perubahan Undang-Undang tentang otonomi daerah yang berimbas ke desa dalam perjalanannya belum dapat direspon seperti yang diharapkan, kewenangan yang dimiliki lembaga desa, dalam prakteknya kini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hanya kini masyarakat memiliki keberanian untuk mengekspresikan sikapnya dalam bentuk unjuk rasa, namun kemampuan untuk menyusun program-program yang betul-betul aspiratif serta “*mach*” dengan kebijakan pemerintah masih perlu pembinaan lebih lanjut”. Adapun dari segi keaktifan anggota lembaga desa dalam memperjuangkan aspirasi dalam proses pembangunan dipandang positif dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin aktifnya para pengurus lembaga desa dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan telah menghasilkan berbagai kegiatan, program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski diakui tidak semua program yang disepakati dapat terealisasi, mengingat keterbatasan-keterbatasan SDM, dana yang tersedia. Oleh karenanya, dukungan birokrasi sangat penting, tentu dengan fungsi dan peranan yang berbeda dengan era

sebelumnya. Peran pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan tunggal dalam melakukan perubahan, tetapi lebih sebagai fasilitator, motivator dalam pembangunan.

### c. Dimensi Ekonomi

Tabel 4.24. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi Ekonomi  
(n = 94)

No	Pertanyaan	Bobot jawaban					Tota l	
		1	2	3	4	5		
30	Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah menurut pengalaman dari sisi pemanfaatan masih belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai	f	3	29	55	7	0	94
		%	3,2	30,9	58,5	7,4	0	100
31	Lembaga desa dapat merealisasikan bantuan atau program yang diperoleh dari pemerintah tingkat atasnya , kepada masyarakat	f	0	33	42	14	5	94
		%	0	35,1	44,7	14,9	5,4	100
32	Menurut Bapak/Ibu, program-program pembangunan telah dirasakan warga masyarakat untuk kelancaran berusaha	f	0	3	4	52	35	94
		%	0	3,2	4,3	55,3	37,2	100
33	Dengan program bantuan pemerintah, kondisi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sudah ada kemajuan berarti	f	2	48	44	0	0	94
		%	2,1	51,1	46,8	0	0	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 58,5 % responden memberi nilai 3 pada pernyataan bahwa adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, menurut pengalaman dari sisi pemanfaatan masih belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai , 44,7% responden memberi nilai 3 atas pernyataan lembaga desa dapat merealisasikan bantuan atau program yang diperoleh dari pemerintah tingkat atasnya kepada masyarakat. 55,3 % responden memberi nilai 4 pada pernyataan menurut bapak/ibu, program-program pembangunan telah dirasakan warga masyarakat untuk kelancaran berusaha. 46,8% responden memberi nilai 3 pada pernyataan dengan program bantuan pemerintah, kondisi daya beli masyarakat dalam



memenuhi kebutuhan belum ada kemajuan berarti. Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap empat pertanyaan dari dimensi media dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.25. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Ekonomi

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	5	1,3	5	cukup
2	113	30,1	226	
3	145	38,6	435	
4	73	19,4	292	
5	40	10,6	200	
Total	376	100	1.158	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 4 \times 94$	376
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 4 \times 94$	1.880
Range	$1.880 - 376$	1.504
Jenjang Range	$1.504 : 5$	301

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
376	677	978	1.158	1.279
				1.580
				1.881

Sumber : Hasil olah data, diolah 2014.

Dari dimensi pemberdayaan ekonomi hasil olah data, memiliki variasi nilai yang secara kumulatif berada pada kategori cukup yaitu sebesar 1.158. Data di atas memperlihatkan bahwa keberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Lamandau melalui perolehan bantuan, memanfaatkan untuk melakukan usaha agar daya beli meningkat belum menunjukkan kemampuan seperti yang diharapkan. Dari segi kesempatan mendapat bantuan, baik secara kumulatif melalui desa maupun secara individu itu sangat bergantung dari jenis program yang diluncurkan. Ada program bantuan yang bersifat pemerataan artinya diberikan kepada seluruh desa, misalnya seperti program Dana Bantuan Pembangunan Desa (PDBD). Namun ada juga program - program dari pemerintah yang sifatnya selektif,

seperti program bedah rumah dan program PM2L, yang setiap tahunnya hanya 3 desa dari kecamatan yang berbeda. Sedangkan dari segi kelancaran usaha dan pemanfaatan bantuan, hal ini berkenaan dengan kondisi masyarakat desa pada umumnya masih rendah kemampuan jiwa *entrepreneur* untuk mengusahakan pemamfaatan modal, sehingga tidak sedikit pinjaman tidak bisa diusahakan bahkan dikembalikan karena usaha macet atau digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan sarannya. Selain itu, pada umumnya usaha di perdesaan, seperti usaha dagang, usaha tani, atau jasa pertukangan biasanya kalah bersaing dengan pengusaha luar yang lebih kuat dan berpengalaman. Menurut penuturan tokoh masyarakat “Masyarakat desa pada umumnya memiliki sedikit ketrampilan dan pengalaman dalam usaha dengan skala usaha yang terbatas, usaha seperti ini sangat rentan terhadap persaingan mutu dan harga, dan minimnya modal usaha, sehingga kendati dari sisi usaha menuntut kerja keras, tapi tetap saja tidak menjamin keberlangsungan usaha ke depan”. Oleh karena itu, pentingnya kelembagaan desa yang membidangi urusan ekonomi masyarakat yakni selain untuk melindungi dari kemungkinan persaingan yang tidak sehat, juga agar usaha mereka tetap *survive* dengan segala keterbatasannya.

#### d. Dimensi Psikologis

Tabel 4.26. Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai dimensi Psikologis (n = 94)

No	Pertanyaan		Bobot jawaban					Total
			1	2	3	4	5	
34	Bagaimana umumnya sikap masyarakat terhadap upaya-upaya inovasi yang disampaikan pemerintah melalui lembaga di tingkat desa	f	0	66	21	7	0	94
		%	0	70,2	22,3	7,4	0	100
35	Dengan perkembangan pembangunan yang semakin cepat berubah ini, Lembaga desa kurang mampu dalam menselaraskan dengan tuntutan-tuntutan tadi	f	1	42	42	9	0	94
		%	1,1	44,7	44,7	9,6	0	100
36	Dengan posisi Bapak/ Ibu dalam kepengurusan lembaga desa saat ini, dirasakan tanggungjawab semakin bertambah	f	0	2	6	36	50	94
		%	0	2,3	6,3	38,3	53,2	100
37	Apakah ada kesan selama ini, bahwa pemerintah desa beserta lembaga desa lainnya masih terlalu banyak menggantungkan diri dari uluran tangan pemerintah	f	1	3	7	65	18	94
		%	1,1	3,2	7,4	69,2	19,1	100
38	Apakah Bapak/Ibu yakin dengan perkembangan peranan lembaga desa seperti ini kemajuan pembangunan desa ini akan segera dapat dicapai	f	0	2	1	46	45	94
		%	0	2,1	1,1	48,9	47,9	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014.

Pada tabel di atas dapat dilihat sebanyak 70,2 % responden memberi nilai 2 pada pernyataan bagaimana umumnya sikap masyarakat terhadap upaya-upaya inovasi yang disampaikan pemerintah melalui lembaga di tingkat desa. 44,7 % responden memberi nilai 3 atas pernyataan dengan perkembangan pembangunan yang semakin cepat berubah ini, Lembaga desa kurang mampu dalam menselaraskan dengan tuntutan-tuntutan tadi, 53,2 % responden memberi nilai 5 pada pernyataan dengan posisi Bapak/ Ibu dalam

kepengurusan lembaga desa saat ini, dirasakan tanggungjawab semakin bertambah, 69,2 % responden memberi nilai 4 atas pernyataan apakah ada kesan selama ini, bahwa pemerintah desa beserta lembaga desa lainnya masih terlalu banyak menggantungkan diri dari uluran tangan pemerintah dan 48,9 % responden memberi nilai 4 atas pernyataan apakah Bapak/Ibu yakin dengan perkembangan peranan lembaga desa seperti ini kemajuan pembangunan desa ini akan segera dapat dicapai. Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dibuat tabel penyebaran frekuensi jawaban dari 94 responden terhadap lima pertanyaan dari dimensi psikologis dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4.27. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Psikologis

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	2	0,4	2	tinggi
2	115	24,5	230	
3	77	16,4	231	
4	163	34,7	652	
5	113	24	565	
Total	470	100	1.680	

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 5 \times 94$	470
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 5 \times 94$	2.350
Range	$2.350 - 470$	1.880
Jenjang Range	$1.880 : 5$	376

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
470	846	1.222	1.598	1.680
			1.974	2.350

Sumber : data hasil penelitian, diolah 2014.

Selanjutnya dari dimensi pemberdayaan psikologis, bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya, modal (dana), tapi berkaitan dengan pembentukan

perilaku yang sadar akan potensi diri dan daya yang dapat dikembangkan dengan memotivasi ke arah yang lebih baik. Dari dimensi psikologis, pemberdayaan berarti juga bagaimana mengukur sikap masyarakat terhadap perubahan, tanggungjawab terhadap kemajuan lembaga dan program-program yang telah direncanakan, kemandirian dan keyakinan untuk melakukan kontrol untuk kemajuan lingkungan dimana mereka berada. Dari hasil olah data lapangan, hasil perhitungan data deskriptif menunjukkan nilai skor **1.680**, ini berarti masuk kategori tinggi. Bila dilihat secara cermat tinggi rendahnya pemberdayaan psikologis ini variatif. Seperti bagaimana sikap masyarakat dalam merespon perubahan, umumnya mereka masih relatif lambat. Hal ini berdasarkan hasil kaji empiris, umumnya masyarakat lambat menerima perubahan, dikarenakan selain mereka tidak memiliki cukup akses terhadap informasi, terbatasnya relasi sosial dengan lingkungan supra struktur, masih lekatnya nilai-nilai tradisional yang kurang kondusif serta sikap defensif (menunggu) terhadap apa-apa yang belum jelas dan terbukti manfaatnya. Pemberdayaan berarti juga adanya *sense of belonging* dari warga masyarakat terhadap lembaga desa dan seluruh produk kebijakannya. Rasa memiliki sesungguhnya bisa mengikat manakala aspirasi mereka terakomodasi oleh lembaga-lembaga desa yang ada. Dari hasil olah data sebagian masyarakat merasa bahwa terikat atau tidaknya mereka pada kelembagaan desa yang ada amat tergantung dari citra lembaga desa itu sendiri di mata masyarakat. Citra lembaga desa tercermin seberapa besar lembaga mampu memberi manfaat, menjadi alat

penyalur dan memberi layanan pada masyarakat. Selama keberadaan lembaga desa hanya mengurus dirinya dan membuat jarak dengan masyarakat tentu akan berpengaruh pada dukungan pada setiap program/kegiatan yang dibuat. Dari pengamatan di lapangan, tingginya tanggapan masyarakat karena keberadaan lembaga desa kendati belum mampu sepenuhnya memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan, namun secara umum masyarakat tetap memandang bahwa bagaimanapun lembaga desa secara psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kehidupan sosial dalam memperjuangkan, mempertahankan nilai-nilai maupun menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan olah data dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat “Pada umumnya masyarakat senantiasa mendukung terhadap program kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah, besar kecilnya dorongan mereka untuk mendukung dan berperan aktif sangat tergantung sejauhmana pemimpin (Kepala Desa beserta jajarannya) mau memperhatikan kebutuhan mereka”.

Tabel 4.28. Rekapitulasi Tabulasi Frekuensi Responden Mengenai Variabel pemberdayaan masyarakat (n = 94)

No	Dimensi		Bobot jawaban					Total
			1	2	3	4	5	
1	sosial	f	8	22	241	184	15	470
		%	1,7	4,5	51,3	39,1	3,4	100
2	Politis	f	3	13	127	155	78	376
		%	0,8	3,5	33,8	41,2	20,7	100
3	Ekonomi	f	5	113	145	73	40	376
		%	1,3	30,1	38,6	19,4	10,6	100
4	Psikologis	f	2	115	77	163	113	470
		%	0,4	24,5	16,4	34,7	24	100

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2014.

Tabel 4.29. Distribusi jawaban responden terhadap dimensi frekuensi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Bobot Jawaban (x)	Distribusi Jawaban		fixi	Kategori
	f	%		
1	18	1,1	18	tinggi
2	263	15,5	526	
3	590	34,9	1.770	
4	575	34	2.300	
5	246	14,5	1.230	
Total	1.692	100	58.400	

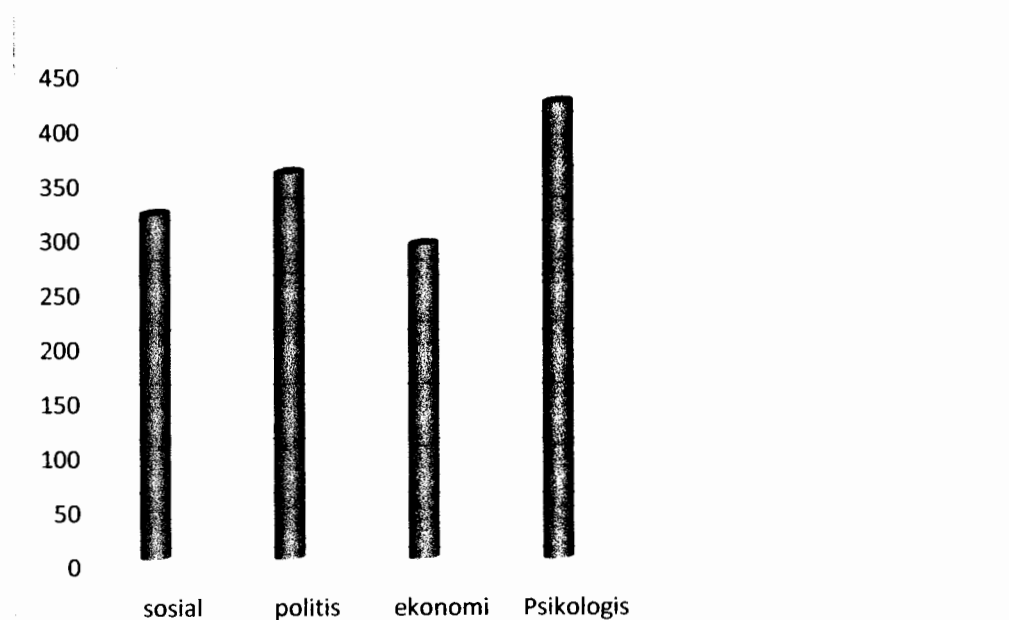
  

Nilai Indeks Minimum	$1 \times 18 \times 94$	1.692
Nilai Indeks Maksimum	$5 \times 18 \times 94$	8.460
Range	8.460 - 1692	6.768
Jenjang Range	6.768 : 5	1.353

sangat rendah	rendah	cukup	tinggi	sangat tinggi
1.692	3.045	4.399	5.752 5.840	7.105 8.460

Sumber : Hasil olah data, 2014.

Grafik 4.2 frekuensi variabel Pemberdayaan Masyarakat



Mencermati hasil penelitian berdasarkan tabel rekapitulasi dan grafik frekuensi di atas, menunjukkan bahwa keberdayaan masyarakat dalam

pembangunan yang dilihat dari 4 dimensi menunjukkan tingkat kemampuan yang secara umum cukup memberi harapan, dengan total skor komulatif 5.840 dengan kategori cukup tinggi atau baik. Pemberdayaan psikologis seperti terlihat pada grafik yang mendapat kategori cukup tinggi, ini dari hasil pengamatan bahwa dengan adanya otonomi daerah berpengaruh kepada bertambahnya rasa percaya diri masyarakat dalam berperan dan mengambil bagian dalam setiap program pembangunan, ini disadari atau tidak, muncul keegoan dari masyarakat terhadap daerahnya sendiri dan memacu rasa memiliki terhadap daerahnya sendiri. Secara psikologis bahwa masyarakat haknya dikembalikan yaitu dapat mengelola daerahnya sendiri dapat terlihat pada grafik bahwa yang memberi kontribusi nilai tertinggi yaitu keberdayaan psikologis karena dari observasi di lapangan yang menjadi Kepala Desa ataupun Lurah di Kabupaten Lamandau rata –rata, putera daerah asli yang secara otomatis memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan di desanya, seperti hal-hal yang bisa diselesaikan secara informal tidak perlu ditangani dengan aturan formal. Permasalahan yang timbul di masyarakat terkadang lebih efektif diselesaikan secara adat ketimbang ke ranah hukum karena masyarakat perdesaan umumnya masih asing dengan hal-hal yang sifatnya formal.

#### **E. Pengujian Hipotesis Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Lamandau.**

Dalam uraian ini penulis akan melakukan pengujian secara statistik dari variabel yang diidentifikasi. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan pengolahan statistik korelasi *product moment*, didapat



koefisien korelasi variabel Komunikasi terhadap variabel pemberdayaan masyarakat dengan hasil  $r = 0,644$  ini berarti terdapat hubungan dalam kategori kuat antara dimensi komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat. Karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai dimensi komunikasi maka semakin besar pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *path analysis* (analisis jalur) menunjukkan adanya pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan (Y), seperti ditunjukkan dari hasil perhitungan ternyata diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,644, koefisien determinasinya sebesar 0,415. Hal ini berarti bahwa 41,5 % proporsi variabel pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Lamandau diterangkan oleh variabel komunikasi, hubungan ini signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini dikuatkan dengan uji  $t$  dimana  $t$  hit lebih besar dari  $t$  tabel,  $t$  hasil perhitungan sebesar 17,34 dibandingkan dengan  $t$  tabel sebesar 2,00 pada taraf kepercayaan 95%, demikian dengan uji  $F$  didapatkan hasil  $F$  hitung sebesar 32,22 yang lebih besar dari  $F$  tabel. 3,09 Ini berarti, proses komunikasi yang dijalankan oleh kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lamandau pada data kumulatif dari dimensi komunikasi cukup tinggi, namun hanya mempengaruhi tingkat pemberdayaan masyarakat sebesar 41,5 %, masih ada 58,5 % tingkat pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari faktor komunikasi. Walaupun demikian, semakin efektif proses komunikasi akan semakin tinggi pula derajat pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan perdesaan . Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Entang Adhy Muhtar (2007) yang menyimpulkan adanya korelasi yang positif antara komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat desa. Inti dari hubungan ini jelas sebagaimana dikonsepsikan dari tujuan pengembangan lembaga desa, yakni agar organisasi beserta pembaharuannya dapat diterima dan didukung oleh lingkungan masyarakatnya. Sedangkan penerimaan ataupun dukungan lingkungan tersebut hanya mungkin terjadi jika adanya proses penyampaian pesan, gagasan atau pembaharuan yang dihantarkan lembaga desa terhadap lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, adanya aliran informasi intra dan ekstra dalam lembaga desa yang bukan hanya sebagai sasaran instruksi, pembinaan semata dari pihak pemerintah supra desa, tetapi juga sebagai wahana penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat (komunikatif) secara timbal balik. Tersedianya umpan balik seperti itu memungkinkan untuk diketahuinya sikap atau respon dari pihak yang terlibat yang dapat menimbulkan perubahan persepsi, sikap, tindakan ke arah yang lebih baik lewat media-media penyampaian informasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, seperti penggunaan media lewat saluran informal seperti pertemuan pertemuan kebhaktian ataupun pengajian, karena cenderung masyarakat belum terbiasa dengan hal-hal yang formal, masyarakat lebih menerima apabila adanya perubahan-perubahan disampaikan lewat media-media informal.

## F. Analisis Teori

Hasil pengolaan data dari lapangan menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan cukup baik. Lewat pesan-pesan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat lebih dominan lewat saluran komunikasi verbal, dengan bahasa yang dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat yaitu bahasa daerah setempat. Saluran ini tidak mengalami kendala berarti, karena pada umumnya, kepala desa di Kabupaten Lamandau adalah putera daerah, sehingga kesamaan makna dalam penyampaian pesan – pesan pembangunan mudah dilakukan, ini sejalan dengan teori Schramm dalam Effendy (1992) bahwa keberhasilan proses komunikasi antara yang diperintah dengan yang terperintah karena adanya kesamaan makna. Kepala Desa sebagai pemerintah menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakatnya sebagai yang terperintah yang berlangsung secara timbal balik dengan menggunakan kerangka acuan yang yang mudah dipahami. Lewat pertemuan-pertemuan yang lebih mendominankan kebiasaan atau budaya yang umum dilakukan di masyarakat akan lebih mudah membangun kesalingpengertian dan kesalingpercayaan antara Kepala Desa dengan masyarakatnya. Ini sesuai dengan teori Komunikasi Pemerintahan menurut Ndarah. Ndarah (2003 : 469) menjelaskan Komunikasi Pemerintahan sebagai proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan *frame of reference*

pihak yang lain, pada posisi dan peran tertentu, berdasarkan kesalingpengertian dan kesalingpercayaan antara kedua belah pihak.

Penyampail pesan – pesan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat lewat media dalam bentuk forum pertemuan, saluran interpersonal tidak begitu menghadapi kesulitan sering dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lamandau. Ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Roger dalam Prastiyanti (2012), bahwa keberhasilan komunikasi saluran interpersonal interaktif dalam merangkul masyarakat lewat forum-forum pertemuan sangat efektif. Keberhasilan komunikasi interaktif sebagai sarana sosialisasi program pembangunan masyarakat desa ini menurut Rogers dalam Prastiyanti (2012) dikarenakan memiliki kelebihan tidak menggunakan saluran formal, karena masyarakat pedesaan yang secara sosiologis masih tergolong sebagai *primary society*, yang masih awam dengan saluran-saluran formal. Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komunikasi yang efektif diperlukan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat agar pesan-pesan atau program-program pembangunan dapat diterapkan dan diterima lingkungannya, dalam memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Siagian 1999:13). Suasana dialogis yang sering dilakukan oleh kepala desa dalam hal merespon upan balik proses – proses pembangunan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Susanto (1973) dalam Taufik (2010) bahwa keberhasilan pembangunan perdesaan yang tinggi diperlukan saluran komunikasi interaktif dialogis.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan analisis pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan pengolahan statistik korelasi *product moment*, didapat koefisien korelasi variabel Komunikasi terhadap variabel pemberdayaan masyarakat dengan hasil  $r = 0,644$  ini berarti terdapat hubungan dalam kategori kuat antara dimensi komunikasi dengan pemberdayaan masyarakat. Karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai dimensi komunikasi maka semakin besar pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *path analysis* (analisis jalur) menunjukkan adanya pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan (Y), seperti ditunjukkan dari hasil perhitungan ternyata diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,644, koefisien determinasinya sebesar 0,415. Hal ini berarti bahwa 41,5 % proporsi variabel pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Lamandau diterangkan oleh variabel komunikasi, hubungan ini signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Sumbangan faktor komunikasi relatif sedang yaitu sebesar 41,5 % faktor pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, masih ada 58,5 % keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dalam

pemberdayaan masyarakat diperlukan interaksi dan hubungan kerja timbal balik yang efektif baik secara internal maupun eksternal dengan berbagai pihak terkait, sehingga setiap kebijakan dapat diterima, diaktualisasikan ke dalam realitas program. Di desa masih lebih dominan berpengaruh faktor kebiasaan atau kultur yang sifatnya mengikat dalam masyarakat, sehingga pengembangan unsur kearifan lokal perlu menjadi perhatian utama dalam menentukan suatu kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya setiap produk-produk lembaga desa berupa usulan program, baik yang bersifat fisik maupun non fisik benar-benar dipertimbangkan dalam rapat-rapat koordinasi pembangunan di tingkat atasnya. Pemberian program dengan model *blue print* (cetak biru) yang sudah diplot secara detail dan bersifat uniformitas oleh lembaga supra desa, hendaknya tetap harus mengindahkan kemampuan dan kebutuhan variasi lokal. Dengan demikian, nilai dan strategi dari model *bottom up planning* yang dipadukan dengan *top down planning* bukan hanya slogan yang menjurus pada formalitas belaka, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam wujud nyata.
2. Untuk memberi motivasi, semangat dan kerjasama yang baik, guna terbinanya konsolidasi ke dalam dan ke luar serta menghindari perbedaan persepsi dan prasangka-prasangka yang timbul dalam masyarakat, sudah sewajarnya apabila Kepala Desa sebagai dinamisator dan fasilitator dapat

menciptakan suasana keterbukaan dan kebersamaan. Disamping itu, perlu menciptakan untuk saling pengertian, saling menerima dan memberi, misalnya dalam bentuk rangsangan (insentif) ataupun penghargaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai nilai tambah dari pengorbanan dan keikutsertaan mereka dalam membantu kelancaran, akselerasi dan kesinambungan pembangunan desa yang bersangkutan.

3. Bagi para teoritis dan peneliti, diharapkan adanya pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kaitan dengan faktor lain yang belum diteliti, termasuk faktor pendidikan dan juga faktor kearifan lokal seperti budaya, dan kebiasaan yang sifatnya mengikat dalam masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhy Entang, 2007, *Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Cianjur*, Hasil Penelitian, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Akadun, 2002, *Model Keberdayaan Aparatur Birokrasi Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Di Kabupaten Bandung*, Hasil Penelitian, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Manajemen Penelitian*, Cetakan keempat, Rineka Cipta, Yogyakarta
- Bahfiarti Tuti, 2012, *Dasar-dasar Teori Komunikasi*, Bahan Ajar, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Chambers, Robert, 1988, *Pembangunan Desa: Mulai dari belakang* (terjemahan), Jakarta, LP3ES.
- Depari, Eduard dan olin Mac Andrews, 1991, *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press.
- Effendy, Onong Uchjana, 1981, *Kepemimpinan Dan Komunikasi*, Bandung :
- , 1992, *Hubungan Masyarakat suatu Studi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Eko, Sutoro, 2004, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta
- Gumilar, ....., *Peran Komunikasi dalam Pembangunan*, Jurnal Ilmiah, Fisip UNTAN
- Ilyas, 2004, *Pengaruh Koumunikasi Orang Tua terhadap Presentasi belajar siswa pada MTsN Model Makassar*, Hasil Penelitian, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Irawan Prasetya, 2011, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Juwanto, Gunawan, 1985, *Komunikasi Dalam Organisasi*, Yogyakarta : Pusbang Manajemen Andi Offset.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan)*, Jakarta : CIDES.
- Nasution, 2002, *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada



- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Di Berbagai Desa*, Jakarta : Yayasan Karya Prisma.
- \_\_\_\_\_ 2003, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Jilid I dan II*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Komunikasi Pemerintahan*, PT Alex Media Komputindo, Gramedia Jakarta
- Prasojo, Eko, dkk, 2010, *Pemerintahan Daerah*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Prastiyanti, 2012, *Mengkomunikasikan Pembangunan pada Masyarakat Pedesaan*, Kajian Ilmiah, FISIP UNSOED
- Rayinda, 2013, *Komunikasi Pemerintahan yang tepat digunakan dalam masyarakat pedesaan*, hasil Penelitian, Fisip UNTAN
- Rochajat dan Elvinaro, 2012, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Rogers, Everett, 1975, *Network Analysis of the Diffusion of Innovation*, Stanford University: Institute for communication Research
- Sya'ban, 2005, *Teknik Analisis Data Penelitian, Bahan Pelatihan*, UHAMKA, Jakarta
- Siagian, Sondang, 1999, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian, 2012, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta (Cetakan ketigapuluh)
- Sitorus, 2010, *Pengaruh Komunikasi dan Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*, Hasil Penelitian
- Sugiyono, 2007, *Statistik untuk Penelitian*, CV. Alfabet Bandung (cetakan kesepuluh)
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Taufik, 2010, *Komunikasi Interaktif Sebagai Model Sosialisasi Program Pembangunan bagi Masyarakat Pedesaan di Era Otonomi*, Jurnal Ilmiah, Universitas Kutai Kertanegara

Wardhani, Cory, 2006, *Komunikasi Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal*,  
Jurnal Ilmiah, Universitas Hasanuddin

Widarjono, Agus, 2010, *Analisis Statistik Multivariat Terapan*, STIM YKPN,  
Yogyakarta

Widjajanti, 2008, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Kajian Ilmiah, Universitas  
Semarang

Sumber – sumber lain :

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah Daerah,  
Jakarta

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah,  
Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik, Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan  
Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan  
Pembangunan Desa, Jakarta

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NASIONAL**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, PondokCabeCiputat 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

**BIODATA**

Nama : ADOLFINA PATANDUK

NIM : 018786195

Tempat dan Tanggal Lahir : Nanggala, 12 April 1974

Registrasi Pertama : 2012

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Inpres Naggala Tahun 1987, Tana Toraja  
2. SMPN Nanggala Tahun 1990, Tana Toraja  
3. SMAN 1 Rantepao Tahun 1994, Tana Toraja  
4. Universitas Hasanuddin, Jurusan Kehutanan,  
Tahun 1998, Makassar

Riwayat Pekerjaan : 1. Karyawan Swasta, PT. Nirmala Agro Lestari  
(Astra Tbk.) Tahun 2001 - 2005  
2. Pegawai Negeri Sipil, Badan Kesbangpol  
Kabupaten Lamandau, Tahun 2006 - sekarang

Alamat Tetap : Jln Gaharu No. 108, Nanga Bulik Kabupaten  
Lamandau, Kalimantan Tengah

Telp/HP : 0821 5504 7432

Email : adolfinapatanduk@gmail.com

### Angket

## PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN LAMANDAU

Petunjuk pengisian :

1. Berilah nilai (angka) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu atau kenyataan yang sebenarnya.
2. Kami mohon semua pertanyaan dapat diisi
3. Lembaga desa disini yakni yg tergabung dalam Tri-mitra (Tokoh Masyarakat ,BPD, LPM )

Identitas responden

Nomor responden : .....

Umur : ..... tahun

Jenis kelamin : laki-laki / Perempuan \*)

Pekerjaan tetap : .....

Unsur Lembaga Desa : Tokoh Masyarakat /BPD /LPM \*).

Jabatan : .....

Pendidikan Terakhir : SD/ SLTP/ SLTA/ D-3/ S-1/ S-2 \*)

Pelatihan yang pernah diikuti : .....

### A. VARIABEL : KOMUNIKASI

#### 1. Komunikator

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
1	Kepala desa selama ini karena kesibukannya, sehingga tidak semua pesan/informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="text"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
2	Dengan banyaknya tuntutan atau keluhan masyarakat, selama ini kepala desa nampaknya kurang begitu respon dalam mengatasi masalah tersebut.	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="text"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
3	Dalam menarik simpati masyarakat untuk melakukan perubahan, apakah kepala desa senantiasa ikut terjun langsung dalam menghadapi hal masalah yang dihadapi selama ini	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="text"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
4	Dalam memecahkan masalah pembangunan desa,apakah Kepala desa suka mempertemukan antara masyarakat dengan pejabat yang berwenang. ?	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="text"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

## 2. Dimensi Pesan

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
5	Dalam penyampaian informasi atau pesan-pesan pembangunan yang disampaikan Kepala Desa, sering menimbulkan berbagai kesalahpahaman ? Apakah itu dirasakan Bapak/Ibu	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
6	Dalam penyampaian pesan –pesan pembangunan melalui berbagai forum pertemuan, bisanya Kepala desa dalam penyampaianya senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
7	Setiap pesan-pesan pembangunan/kebijakan yang baru selama ini masyarakat belum merasakan mamfaatnya	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

## 3. Dimensi Media

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
8	Dalam mengadakan pendekatan kepada masyarakat oleh Kepala Desa, apakah suka dilakukan secara informal (melalui anjang sana atau mengajak bicara secara pribadi, misalnya) ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
9	Menurut Bapak/Ibu apakah forum pertemuan (seperti pengajian, kebaktian tuma tangga) ,apakah digunakan dalam menyampaikan pesan oleh Kades ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
10	Forum pertemuan dengan para tokoh masyarakat , apakah sering dilakukan oleh kepala desa ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
11	. Dalam melakukan hubungan kerja keluar, apakah mamfaatkan jaringan hubungan kerja melalui forum-forum lain (paguyuban,asosiasi) ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
12	Selain pesan atau informasi pembangunan yang diterima dari para pejabat yang berwenang, apakah Bapak/Ibu sering mamfaatkan dari sumber media massa (TV, Radio) ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

## 4. Dimensi Komunikasikan

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
13	Dalam menerima setiap perubahan kebijakan, bagaimana kemampuan lembaga desa dalam menanggapi terhadap perubahan tersebut	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
14	Selama ini perubahan - perubahan yang terjadi di lembaga - lembaga desa nampaknya sangat lambat. Setujukah dengan hal tersebut	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
15	Apakah hubungan yang dilakukan Kepala Desa dengan organisasi/ lembaga sosial lain yang selevel (BPD, LPM, PKK, LSM) nampak banyak menemui kesulitan ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
16.	Dengan keadaan desa yang tersebar ke berbagai pelosok , apakah hubungan kerja dengan pemerintah tingkat atasnya banyak menghadapi hambatan (kesulitan) ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

## 5. Dimensi Umpan Balik

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
17	Bagaimana dukungan lingkungan masyarakat terhadap langka-langka yang dilakukan lembaga- lembaga desa yang ada ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
18	Dalam memecahkan persoalan pembangunan di desa, menurut pengalaman apakah ada suasana dialogis (saling bertukar pikiran) antara Kepala Desa dengan semua elemen lembaga yang ada termasuk tokoh-tokoh masyarakat desa ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
19	Dalam acara penyampaian informasi atau laporan pertanggung jawaban, sudah tercermin adanya suasana keterbukaan/saling pengertian ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
20	Dari hasil musyawarah yang telah disepakati , bagaimana tindak lanjut dari setiap permasalahan yang dihadapi	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

## B. VARIABEL PEMBERDAYAAN

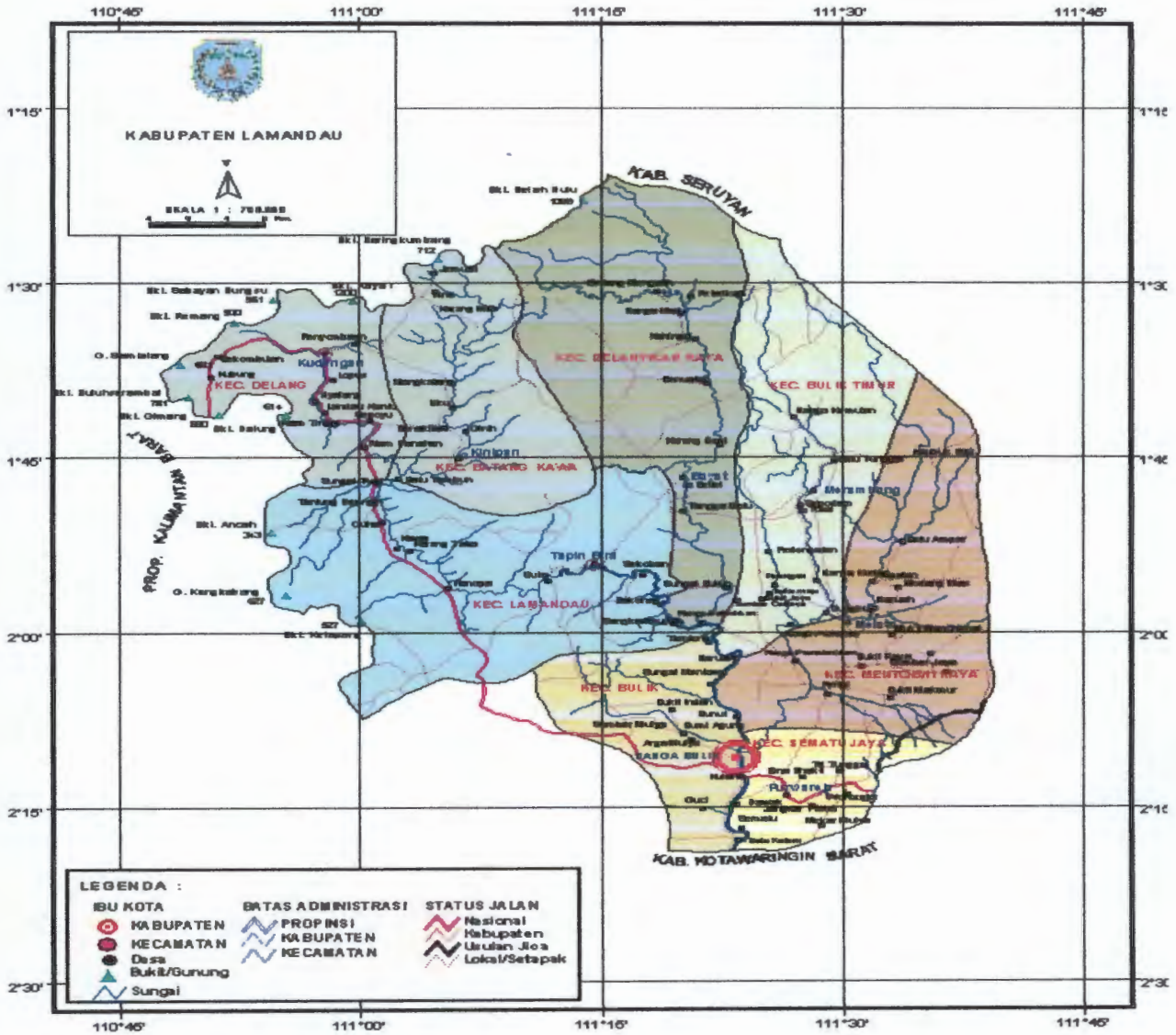
## 1. Dimensi Sosial

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
21	Selama ini masyarakat masih merasa sulit memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka ikut mengontrol kinerja pemerintah desa	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
22	Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini masyarakat mendapat kemudahan memperoleh layanan dari pemerintah sesuai dengan harapan	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
23	Bila diperhatikan apakah bantuan yang diberikan pemerintah baik dana maupun teknis sudah mampu memancing swadaya masyarakat yang lebih besar ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
24.	Dengan adanya perubahan pengaturan/kebijakan tentang lembaga desa (Pemdes,LPM,BPD) tidak berdampak positif pada tatanan gotong royong masyarakat	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
25	Menurut Bapak/Ibu, dengan perubahan kebijakan ,apakah lembaga desa lebih memperlihatkan kemampuan kerjasama secara sinergis dengan lembaga supra desa (Kec/Pemda ) ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

## 2. Dimensi Politis

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					
26	Dari pengamatan Bapak/Ibu, para pengurus lembaga desa semakin mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
27	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah keberadaan lembaga desa dalam menjalankan fungsi & wewenangnya telah sesuai dengan apa yang diharapkan ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
28	Seberapa besar peranserta aktif masyarakat untuk menjalankan program pembangunan desa melalui wadah kelembagaan desa yang ada ?	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			
29	Selama ini , program bantuan pemerintah dalam pelaksanaannya kurang menyentuh kepada kelompok warga yang miskin.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5			

Lampiran 2. Peta Geografis Kabupaten Lamandau



Tugas Akhir Program Magister (TAPM)



## Lampiran 3 .Perhitungan Besar Sampel Penelitian

Besarnya sampel Penelitian :

$$n_0 = \{(Z_{1/2 \alpha})/2BE\}^2$$

$$n_0 = \{(1,96)/2BE\}^2 = \{(1,96)/(2 \times 0,08)\}^2 = 150,062$$

$$150.06 > 0.05 (249)$$

$$150.06 > 12.45$$

jadi :  $n_0 > 0,05 N$  atau  $150,062 > 12,45$  maka rumus penentuan sampel yang dipakai :

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

$$n = \frac{150.062}{1 + \frac{150.062 - 1}{249}}$$

= 93.8 dibulatkan 94 Responden